

PETA PROSES BISNIS



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. IR H. Juanda No.100 Margahayu Telp. & Fax : (021) 22102950
Website : <http://dpmpstsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpstsp@bekasikota.go.id
B E K A S I

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI**

NOMOR : 065 / Kep.42-DPMPTSP / IV / 2022

TENTANG

**PETA PROSES BISNIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti atas Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 065/Kep.516-Org/X/2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Bekasi, maka perlu disusun Peta Proses Bisnis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi tentang Peta Proses Bisnis pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 02 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 117 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 117 Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 065/Kep.516-
Org/X/2021 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota
Bekasi;

2. Berita Acara Rapat Nomor : 100/131-BA/DPMPTSP.Set
tanggal 18 April 2022 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Peta Proses Bisnis pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi.

KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, merupakan pedoman/acuan bagi aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan kegiatan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KEEMPAT : Pada saat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi ini mulai berlaku, keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi Nomor 065/Kep-136/DPMPTSP.Set Tentang Peta Proses Bisnis Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 21 April 2022

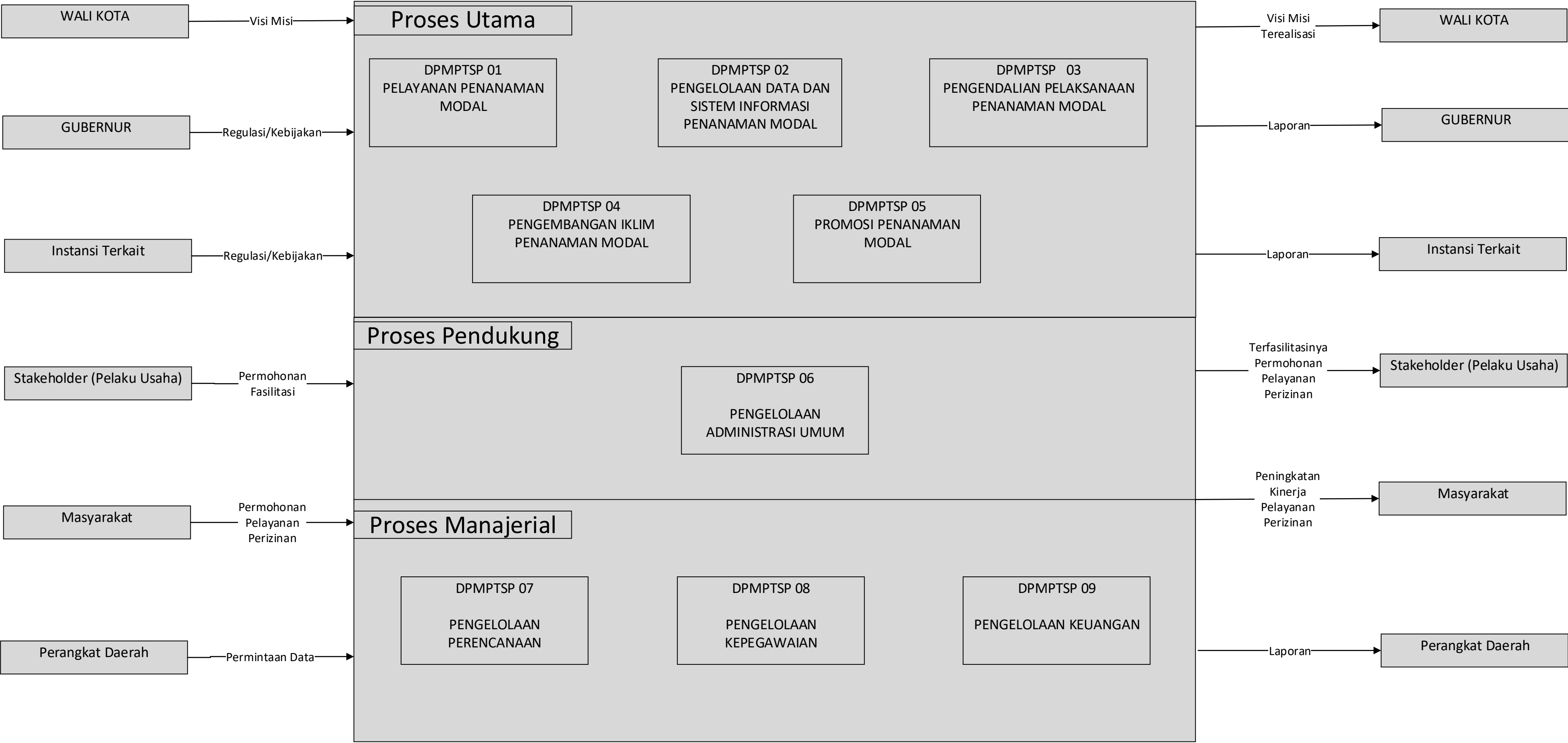
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
BEKASI,**

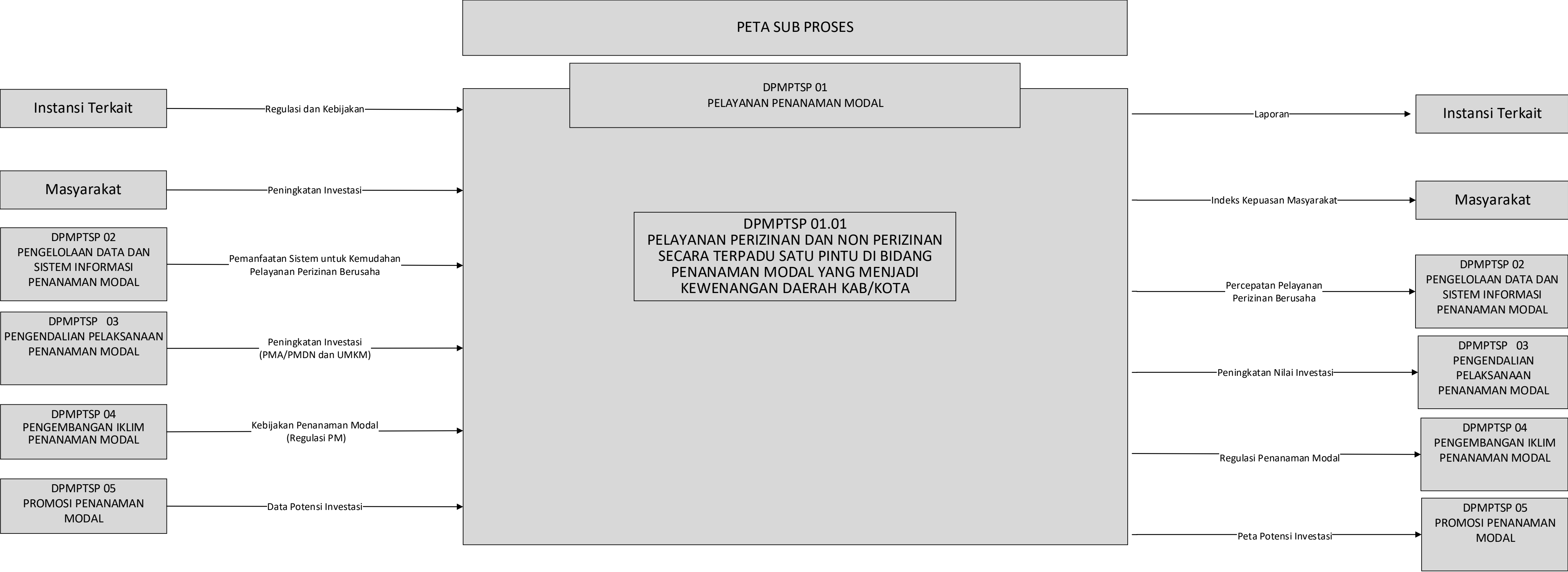


LINTONG DIANTO PUTRA

Tembusan Yth :

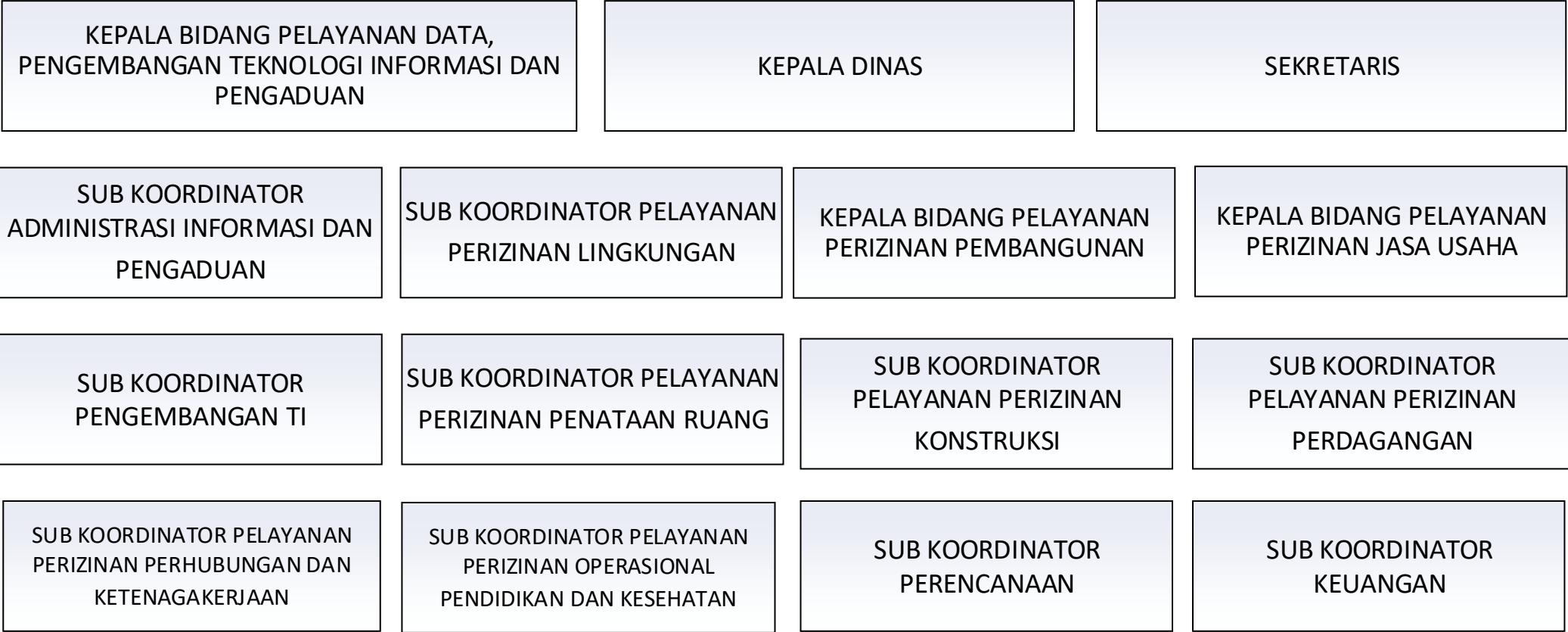
1. Wali Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.





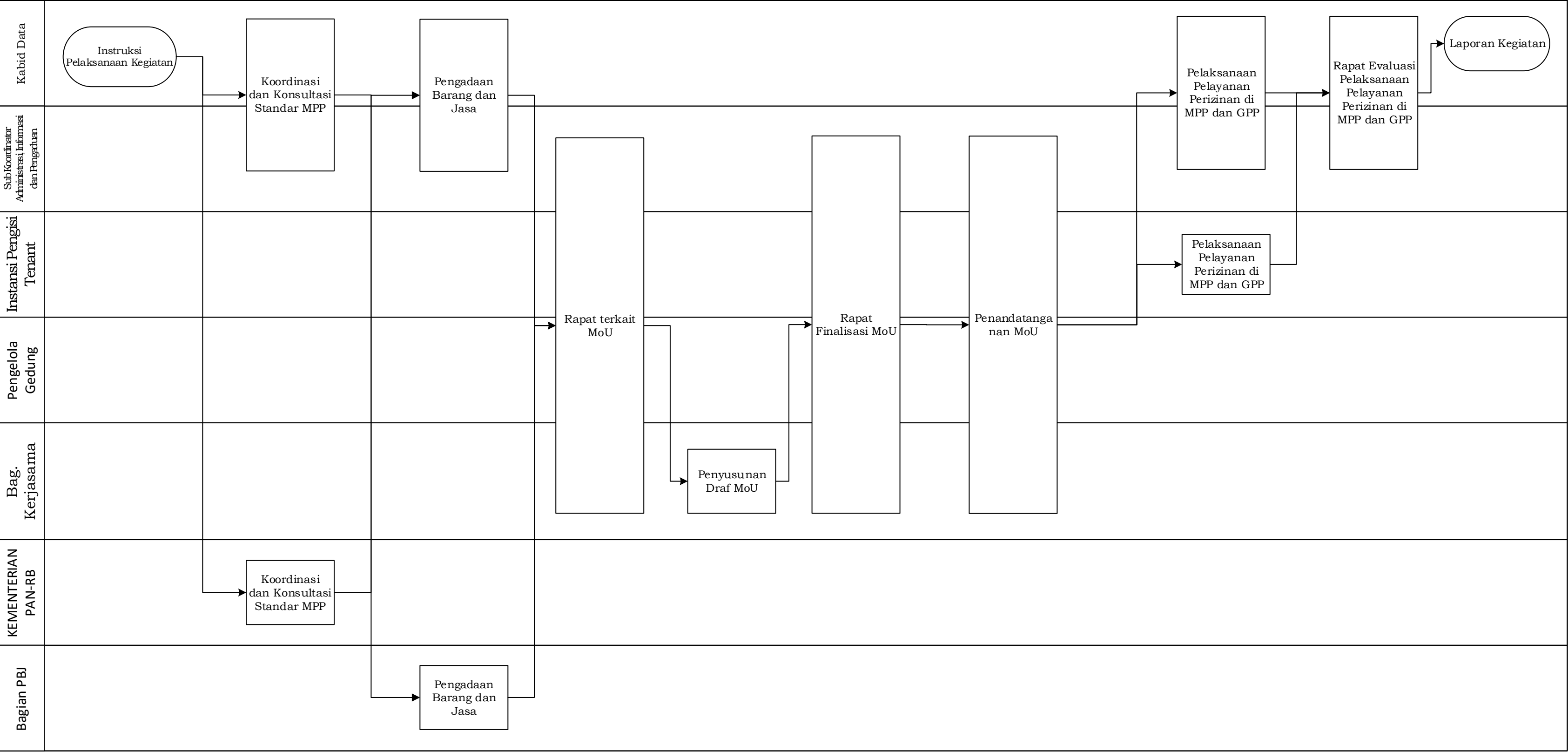
PETA RELASI

DPMPTSP 01.01
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU
PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KAB/KOTA



DPMPTSP 01.01 CFM01

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Jumlah Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Mall Pelayanan Publik)



Instansi Pengisi Tenant :
1. BPR Syariah;
2. Kantor Pajak;
3. Telkom;
4. BPN Kota Bekasi;
5. Kejaksaan Negeri;
6. BPJS Kesehatan;

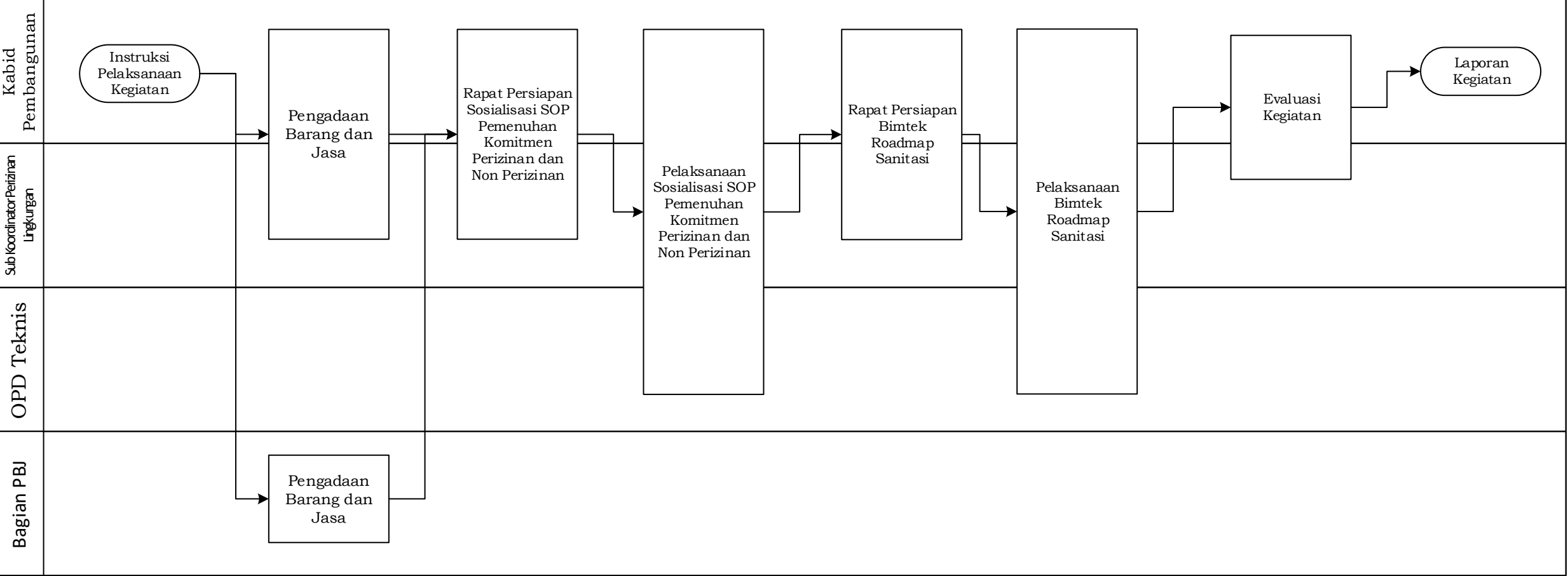
7. Kantor Imigrasi Kota Pintu;
8. Kemenag Kota Bekasi;
9. BJB;
10. PT POS Indonesia;
11. Samsat Jawa Barat;
12. Polres Kota Bekasi;
13. BNI;

14. BPRS Patriot Bekasi;
15. KPPBC TMP A BEKASI;
16. DJP JABAR III;
17. DPMPTSP JABAR;
18. Bapenda Kota Bekasi;
19. Disdukcapil Kota Bekasi;
20. Dinkes Kota Bekasi;

21. TASPEN;
22. BPJS Ketenagakerjaan;
23. PDAM Kota Bekasi;
24. Disnaker Kota Bekasi;
25. DPMPTSP Kota Bekasi;

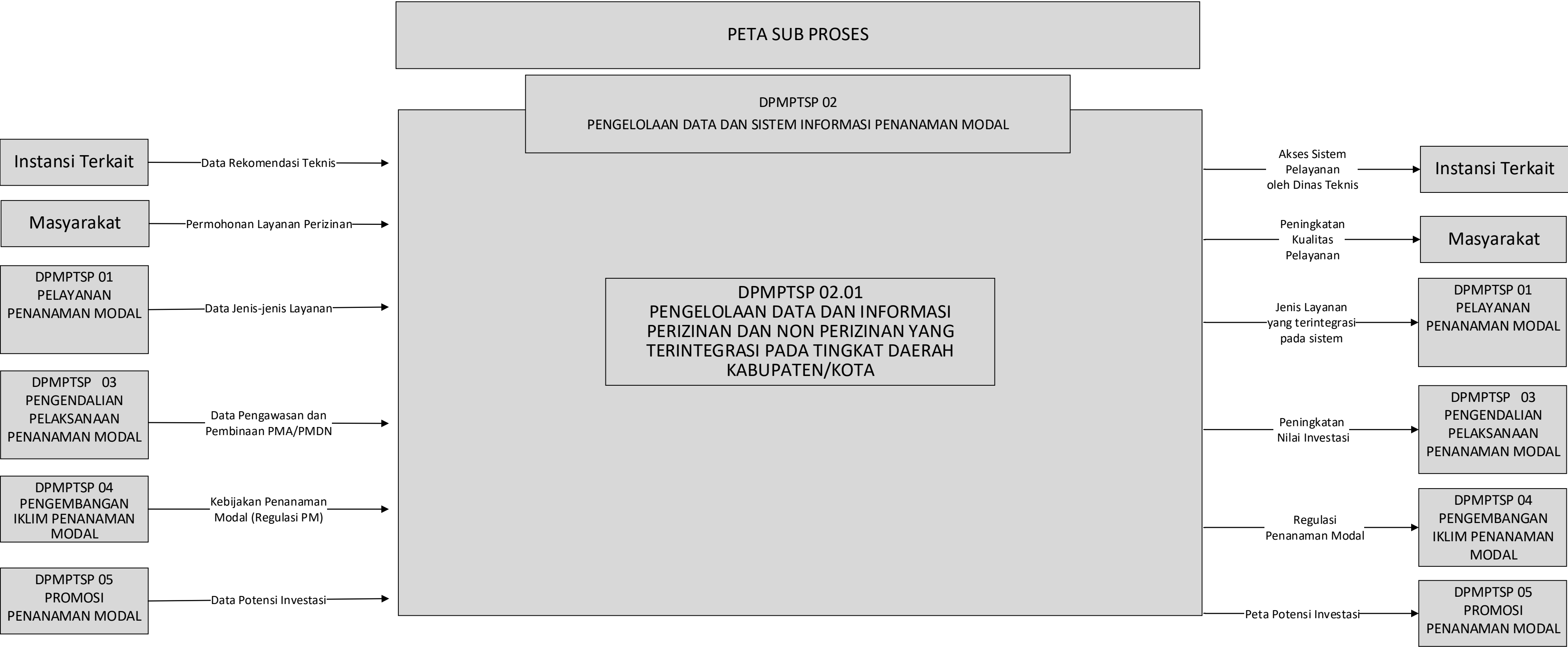
DPMPTSP 01.01 CFM02

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman Modal (Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan)



OPD Teknis :
1. Dinas LH;
2. DBMSDA;
3. DISTARU;
4. Dinkes;
5. DIsdik

6. Distanikan;
7. Disparbud;
8. DISHUB;
9. Disnaker;
10. Disperindag;



PETA RELASI

DPMPTSP 02.01 PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA,
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGADUAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
PENGEMBANGAN TI

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
ADMINISTRASI INFORMASI DAN
PENGADUAN

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN PEMBANGUNAN

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PM

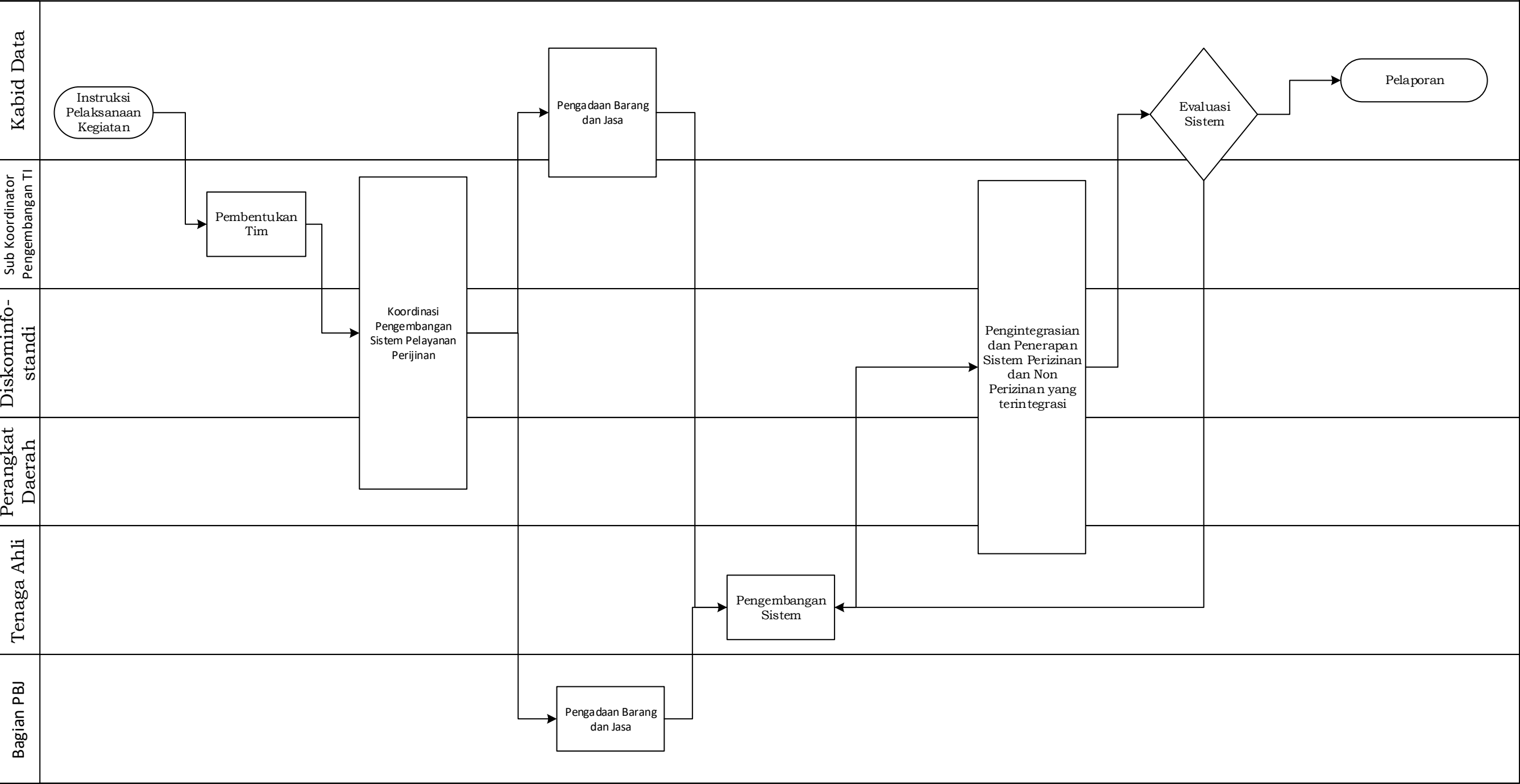
KASI PELAYANAN PERIZINAN
LINGKUNGAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

DPMPTSP 02.01 CFM01

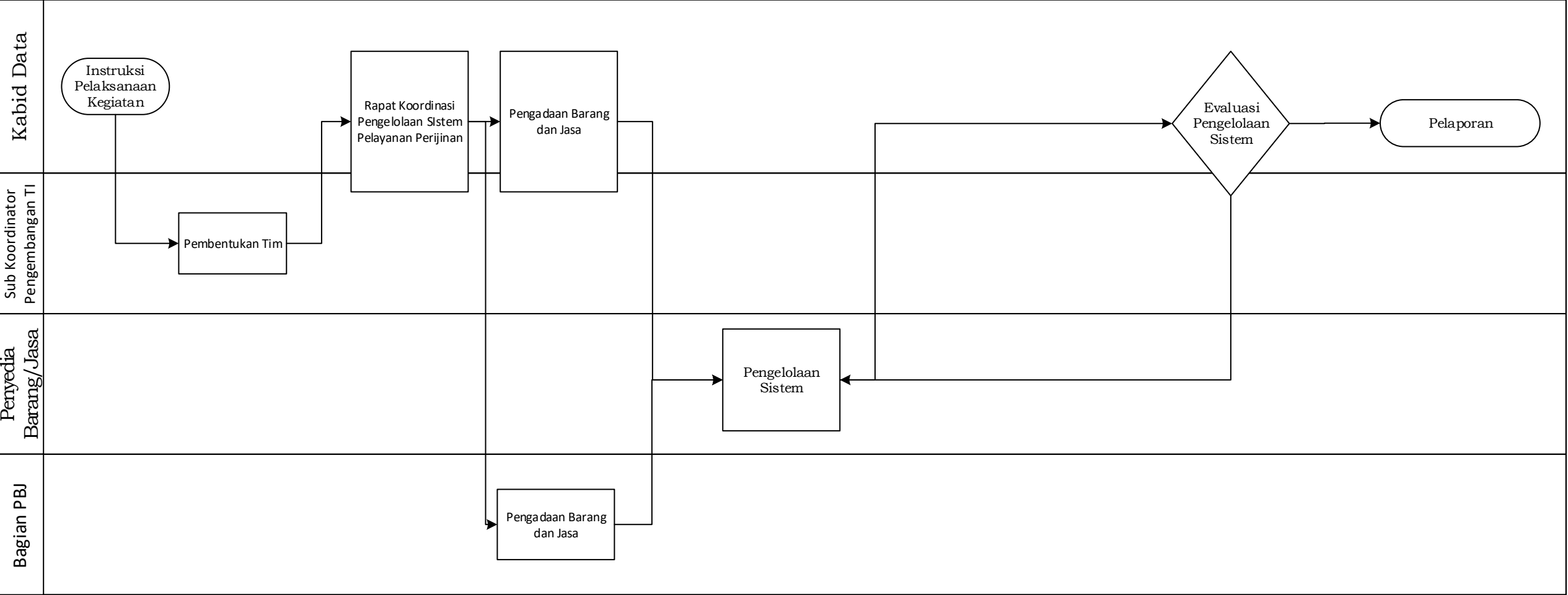
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pengembangan Sistem)



- Perangkat Daerah :
- 1. DISDUKCAPIL
 - 2. DISPERKIMTAN
 - 3. BAPENDA
 - 4. Dinas LH
 - 5. Dinas Kesehatan
 - 10. DISHUB
 - 11. DISDAGPERIN
 - 12. DISDIK
 - 13. DISKOMINFO
 - 14. BAPPELITBANGDA
 - 15. DBMSDA
 - 16. DISKOP UKM
 - 17. DISNAKER

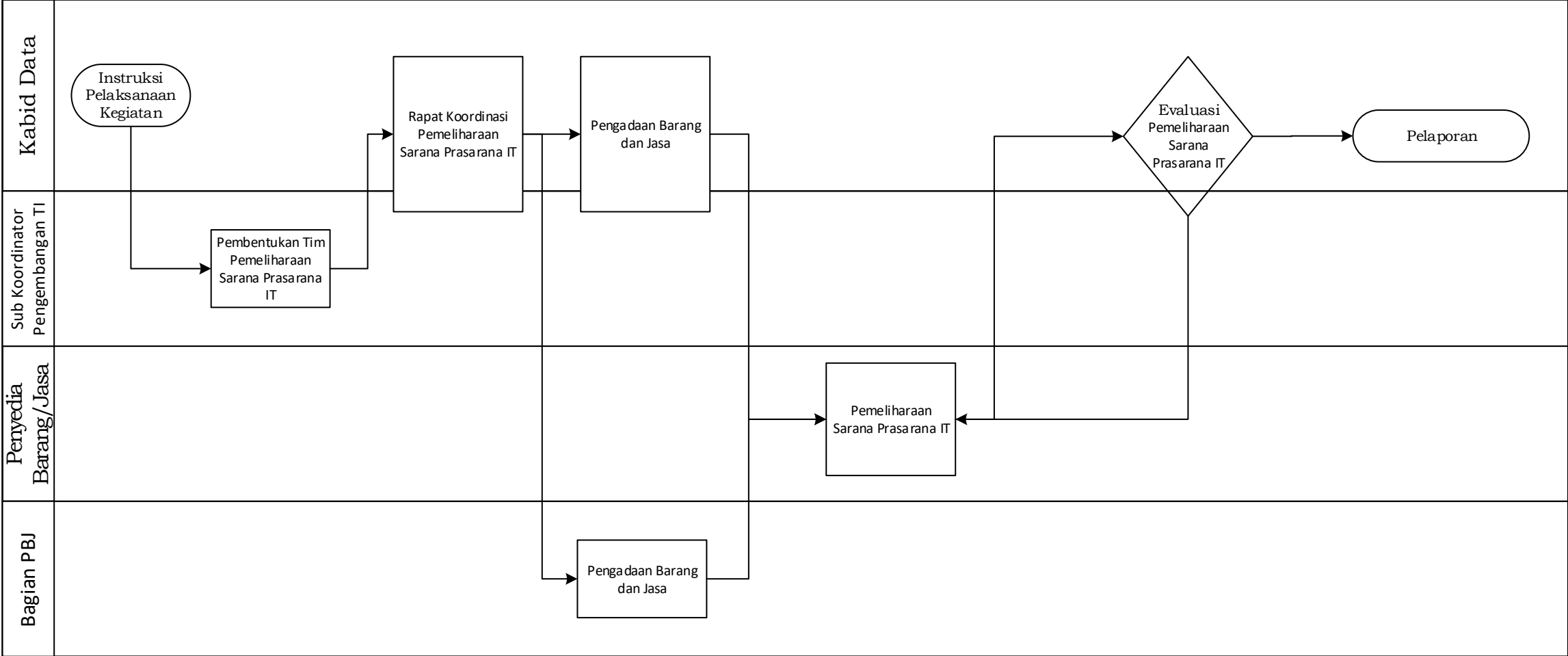
DPMPTSP 02.01 CFM02

Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pengelolaan Sistem)



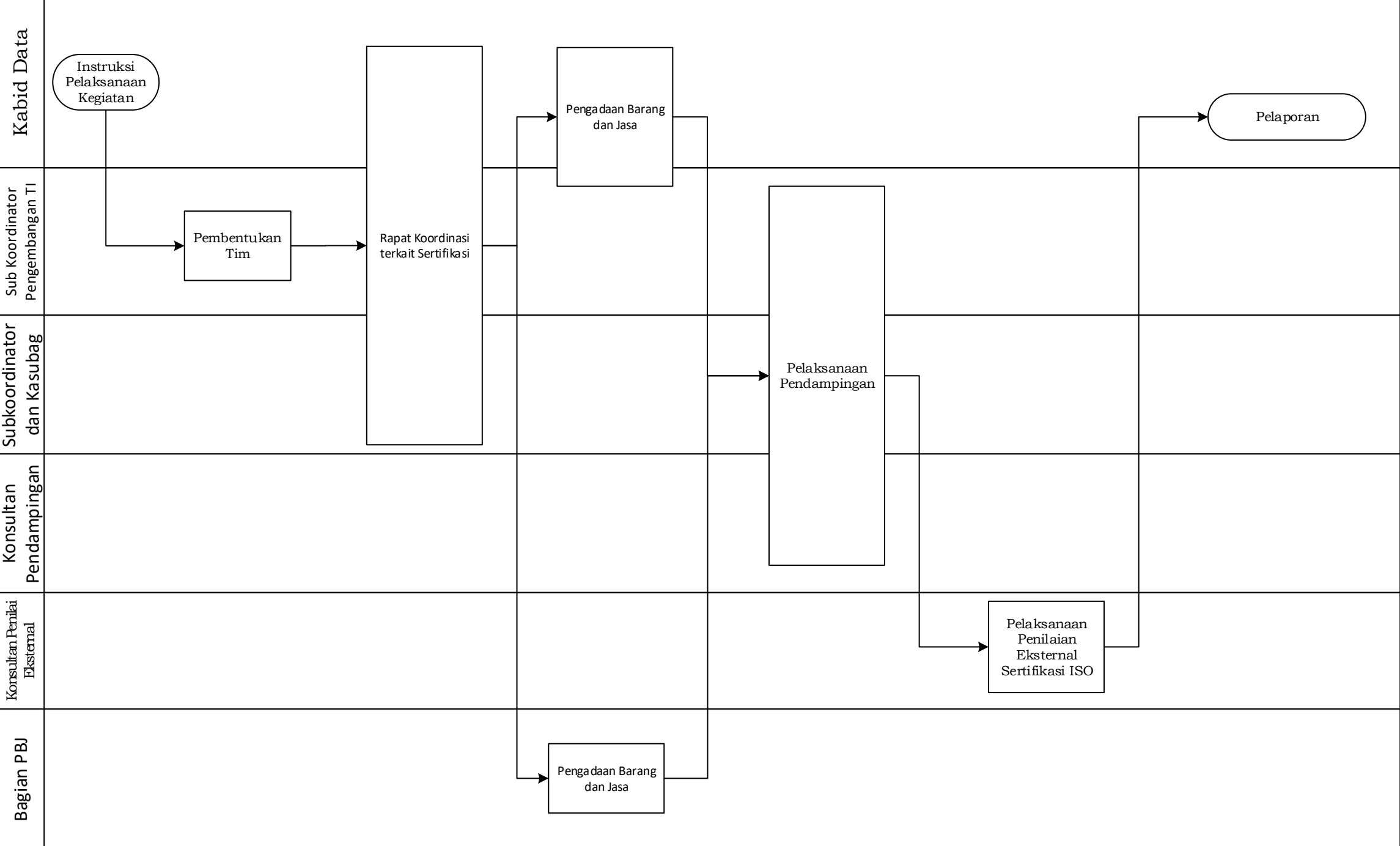
DPMPTSP 02.01 CFM03
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pemeliharaan Sarana Prasarana IT)

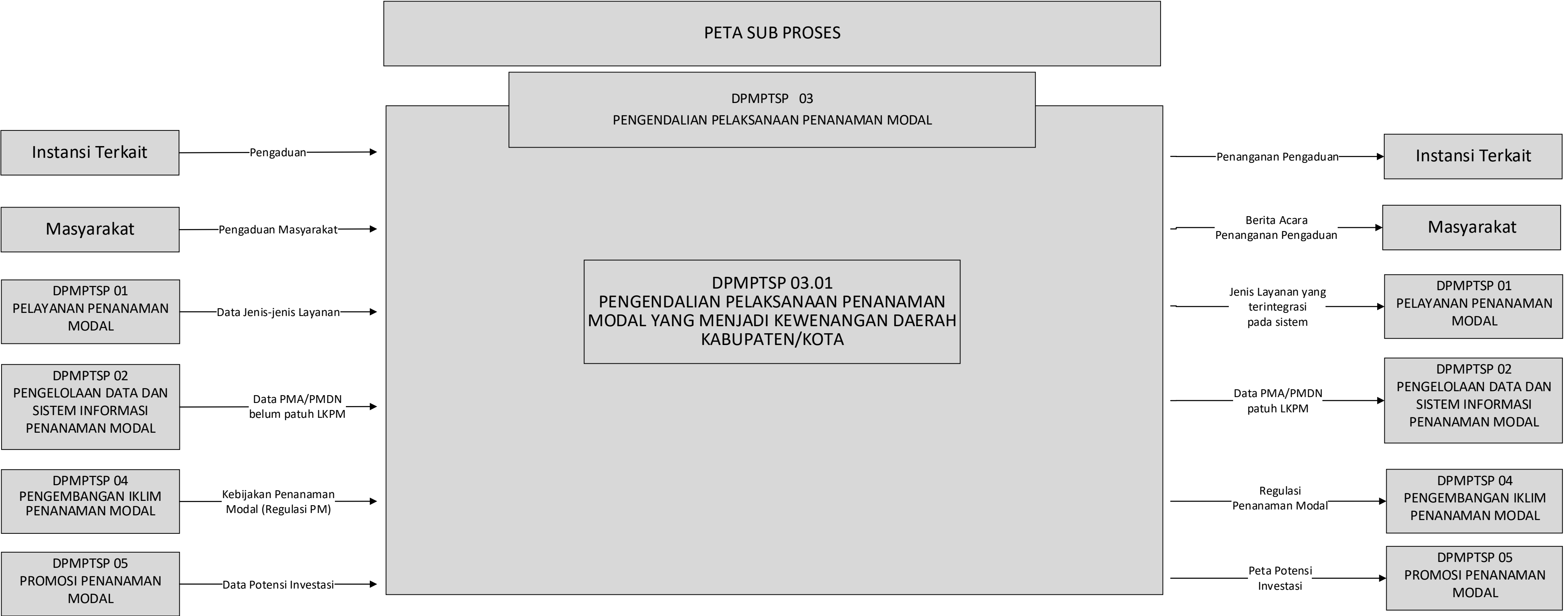
DPMPTSP 02.01 CFM03
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Pemeliharaan Sarana Prasarana IT)



DPMPTSP 02.01 CFM04

Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Sertifikat ISO)





PETA RELASI

DPMPTSP 03.01
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB KOORDINATOR
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PM

SUB KOORDINATOR
PEMBINAAN PELAKSANAAN PM

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

SUB KOORDINATOR
PEMANTAUAN PELAKSANAAN
PM

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN IKLIM PM

SUB KOORDINATOR
PROMOSI PM

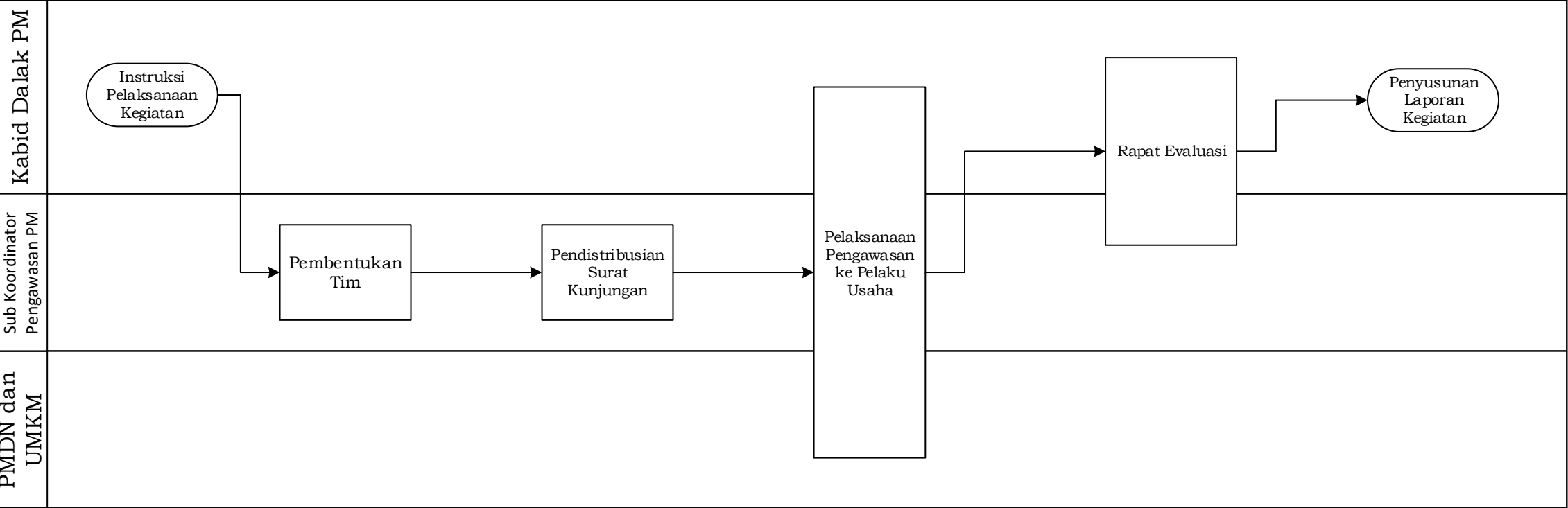
SUB KOORDINATOR
DEREGULASI PM

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

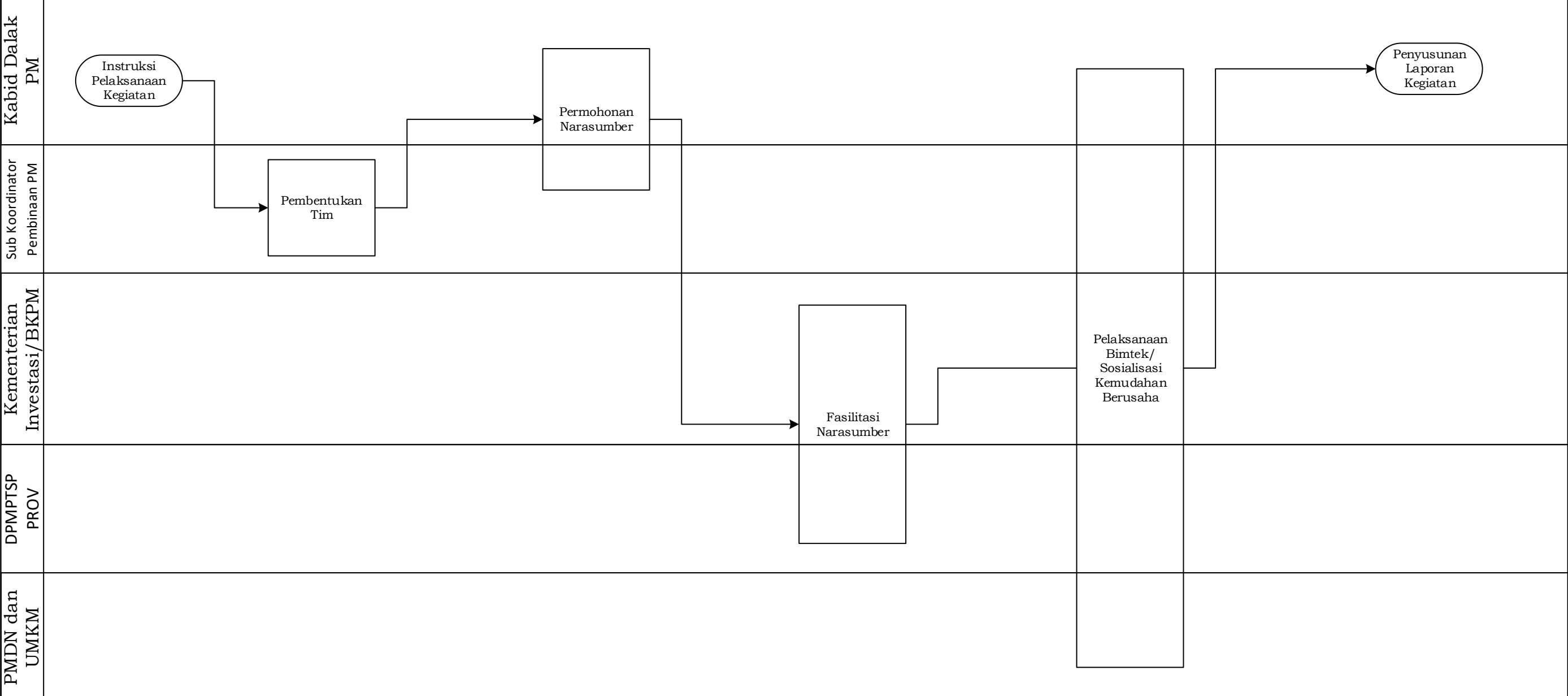
DPMPTSP 03.01 CFM01

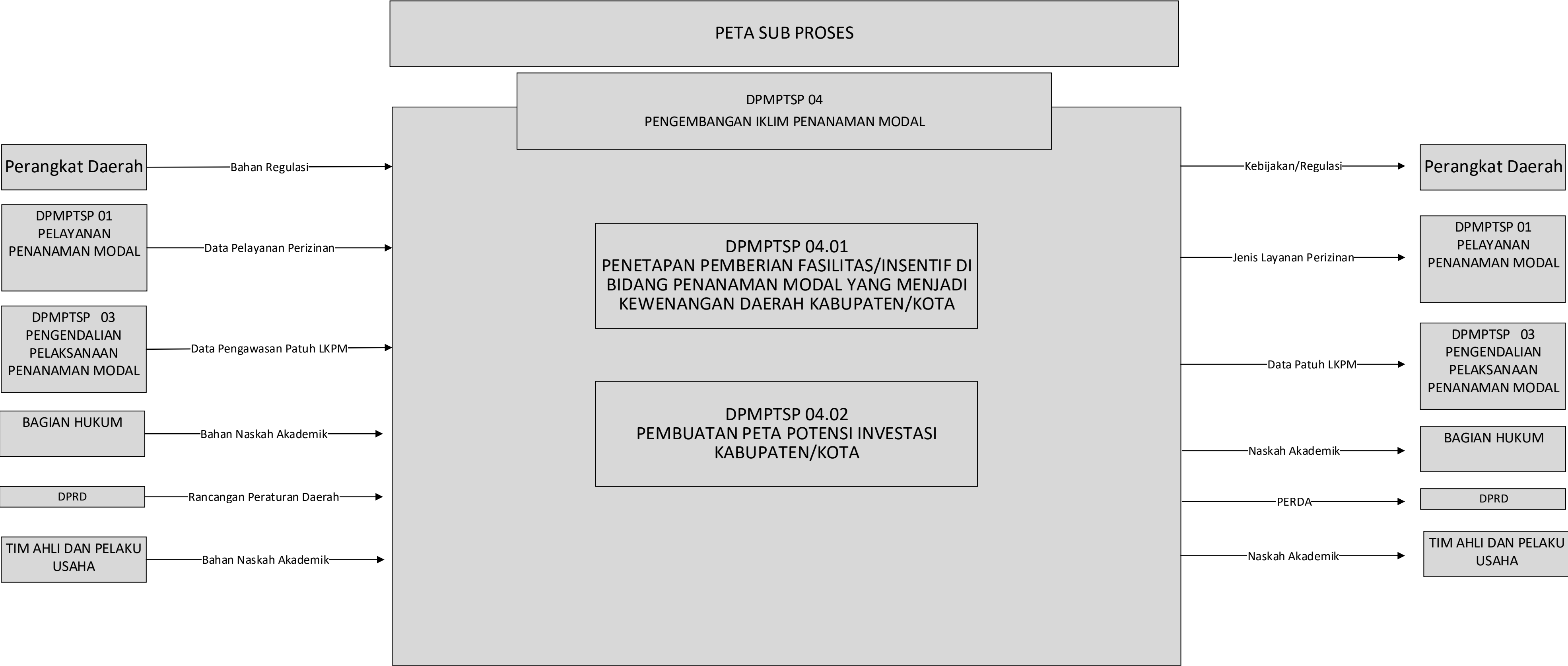
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (Jumlah PMDN dan UMKM)



DPMPTSP 03.01 CFM02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (Pembinaan PMDN, dan UMKM)





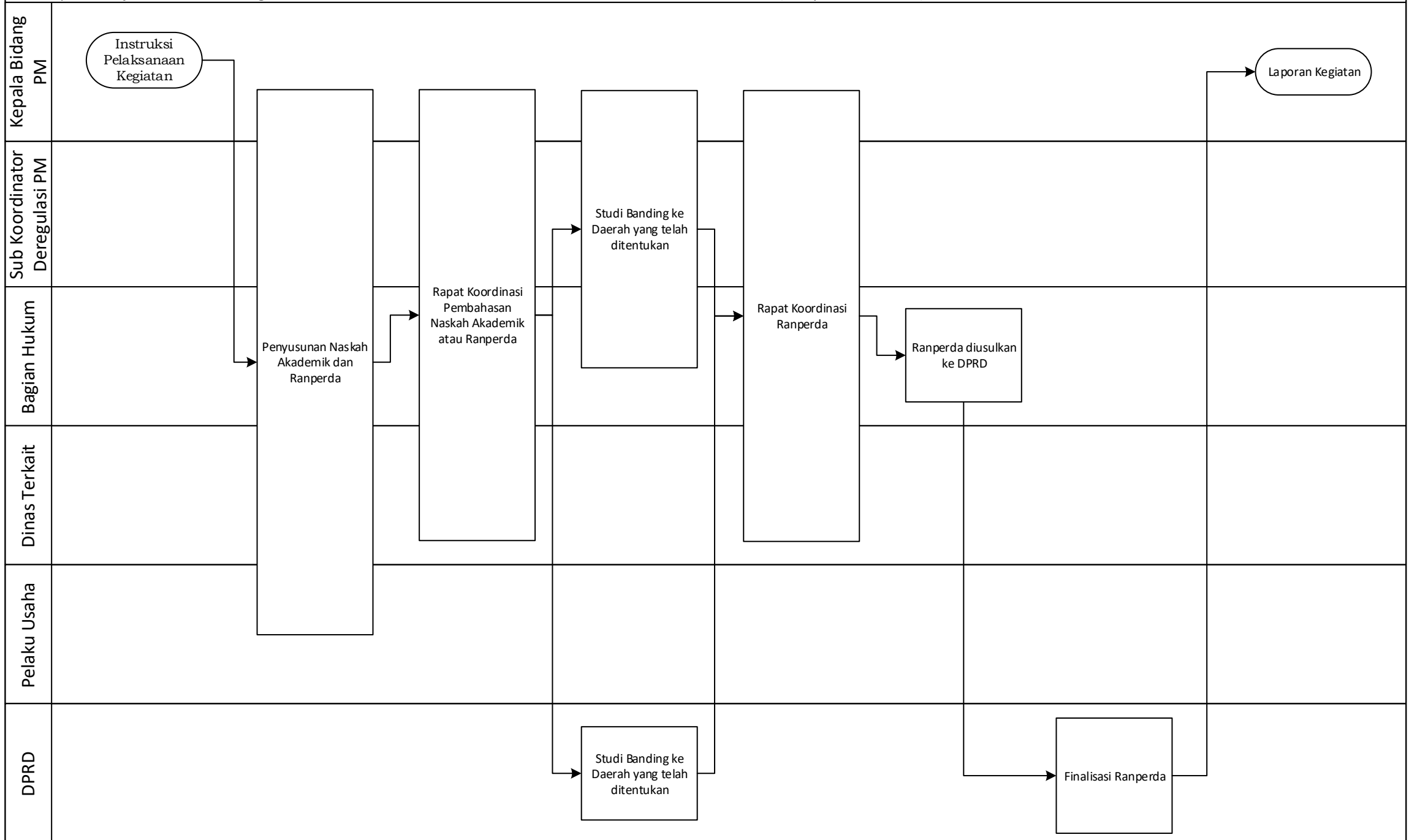
PETA RELASI

DPMPTSP 04.01
PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DI BIDANG PENANAMAN
MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	SUB KOORDINATOR DEREGULASI PM
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA, PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGADUAN	SUB KOORDINATOR PROMOSI PM	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM
SUB KOORDINATOR PENGAWASAN PELAKSANAAN PM	SUB KOORDINATOR PEMBINAAN PELAKSANAAN PM	SUB KOORDINATOR PEMANTAUAN PELAKSANAAN PM	SUB KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA PM
SUB KOORDINATOR PENGEMBANGAN TI	SUB KOORDINATOR ADMINISTRASI INFORMASI DAN PENGADUAN	SUB KOORDINATOR KEUANGAN	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN

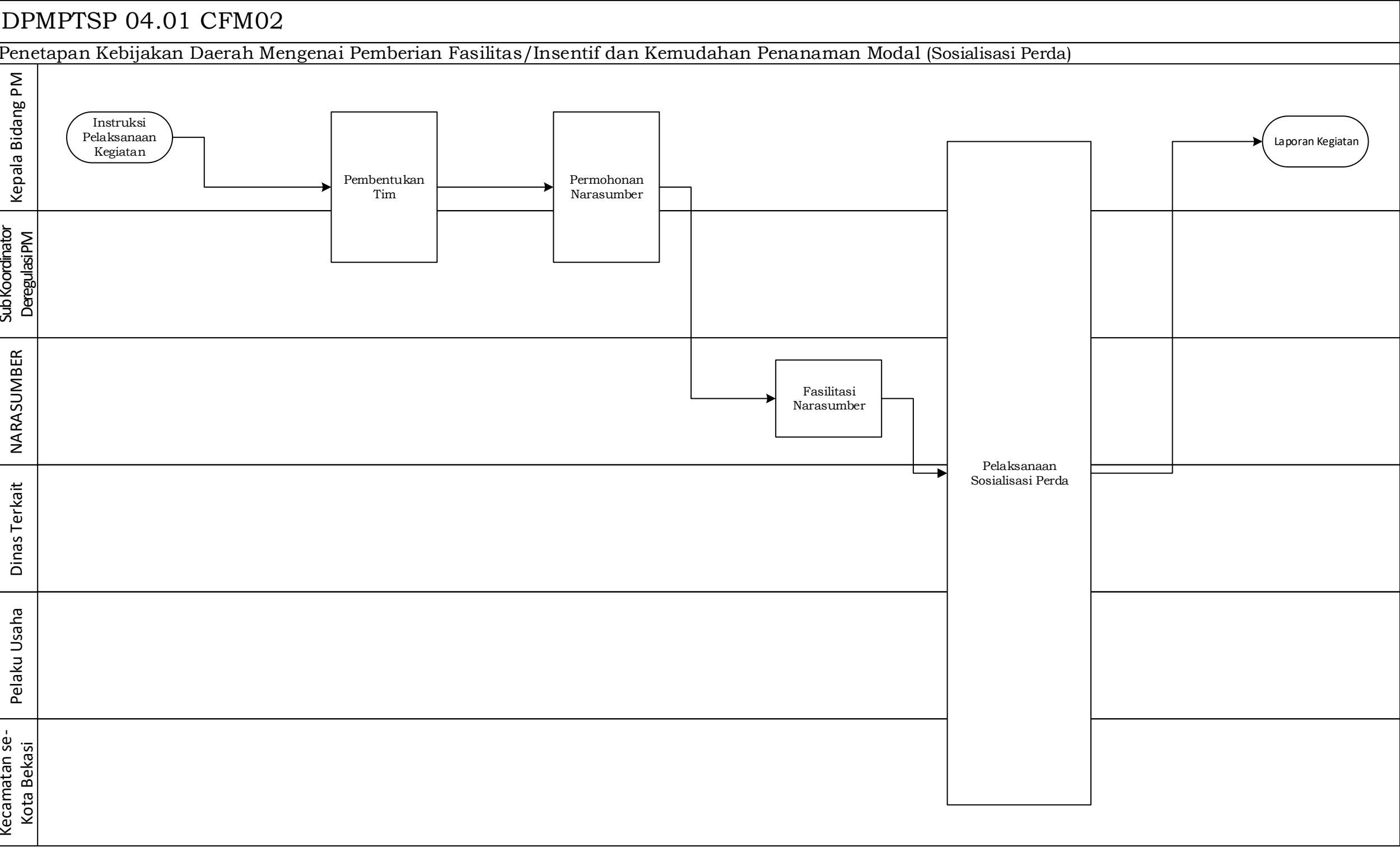
DPMPTSP 04.01 CFM01

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Penyusunan Perda)



Dinas Terkait :

1. Bappelitbangda
2. Distaru
3. Disdagperin
4. Dinas Koperasi dan UKM
5. Disparbud
6. Disketapang
7. Disperkimtan



- Dinas Terkait :
1. Bappelitbangda

2. Distaru

3. Disdagperin

4. Dinas Koperasi dan UKM

5. Disparbud

6. Disketapang

7. Disperkimtan

- Narasumber :
1. BKPM

2. DPMPSTSP Pemprov Jabar

PETA RELASI

DPMPTSP 04.02
PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI
KABUPATEN/KOTA

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB KOORDINATOR
DEREGULASI PM

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

SUB KOORDINATOR
PENGEMBANGAN TI

SUB KOORDINATOR
PROMOSI PM

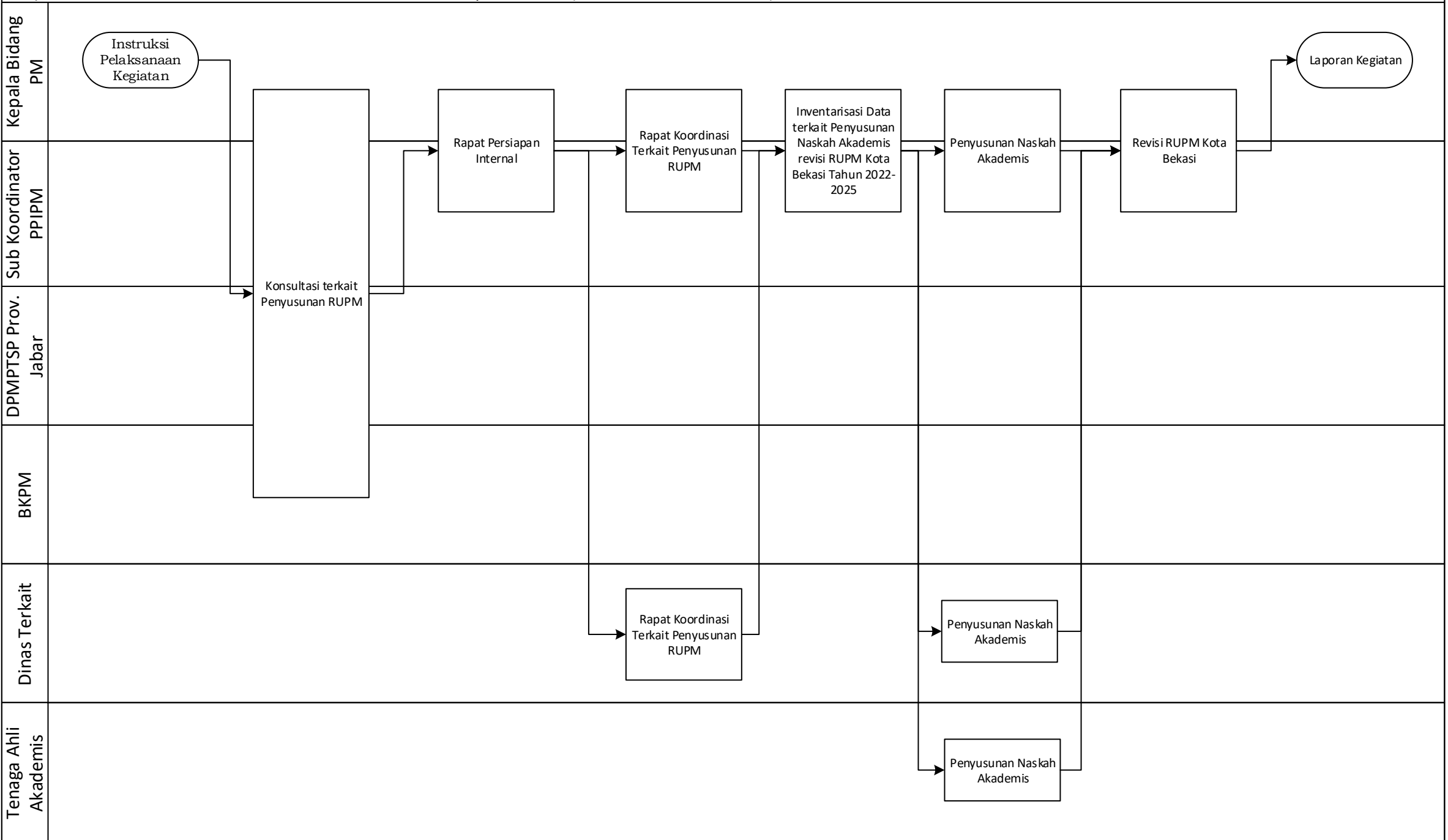
SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN IKLIM PM

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

DPMPTSP 04.02 CFM01

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah Dokumen RUPM)	
1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah Dokumen RUPM)

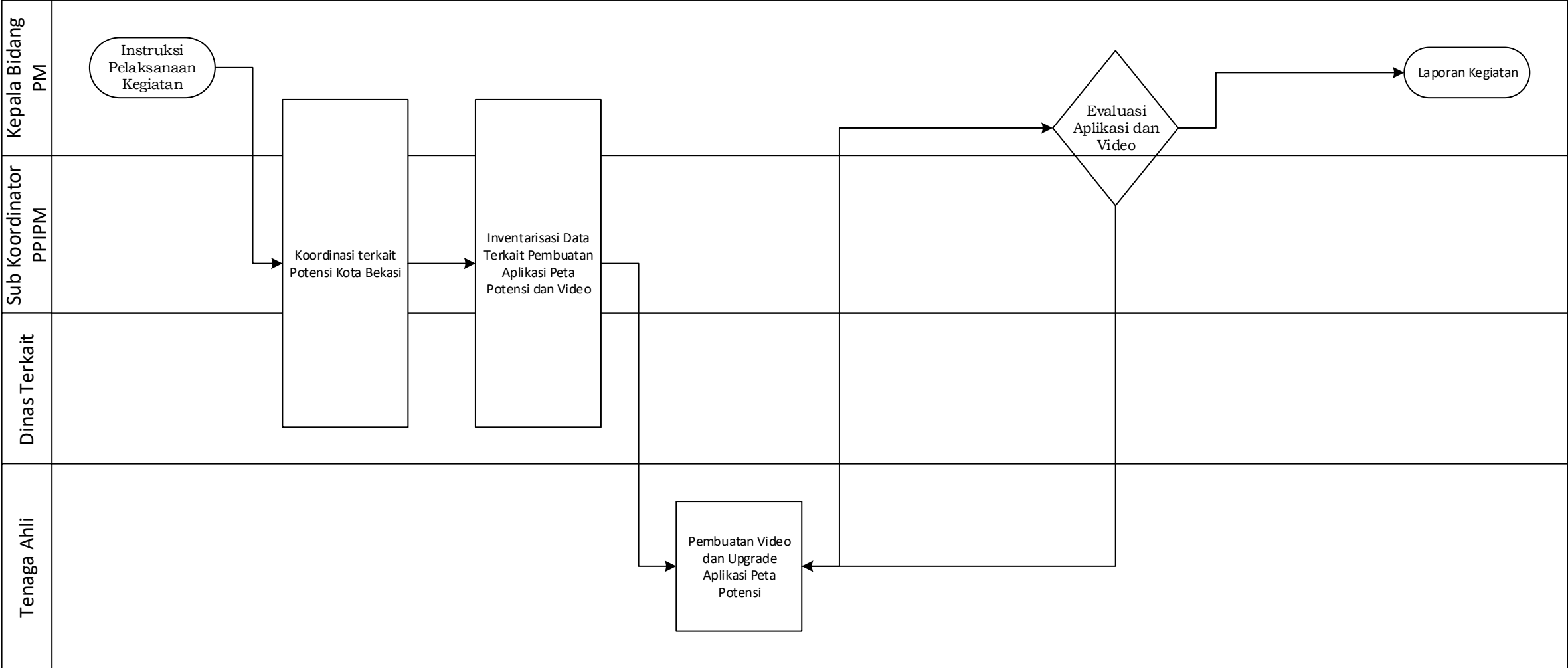


Dinas Terkait :

1. Bappelitbangda
2. Bagian Ekonomi
3. Bagian Hukum
4. Distaru
5. Disdagperin
6. Dinas Koperasi dan UKM
7. Disparbud
8. BPS
9. Disketapang
10. Disperkintan
11. Dinas Lingkungan Hidup
12. Dinas Perhubungan

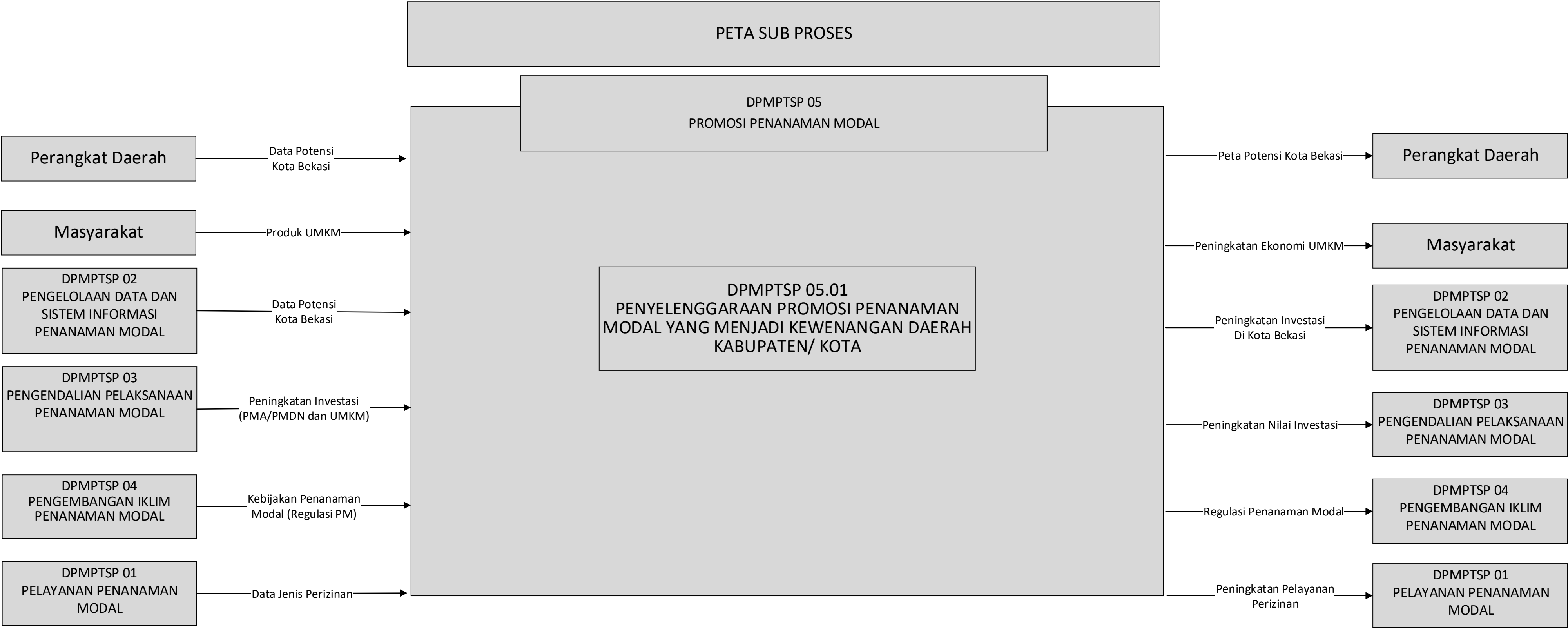
DPMPTSP 04.02 CFM02

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Jumlah Aplikasi)



Dinas Terkait :

1. Distaru
2. Disdagperin
3. Dinas Koperasi dan UKM
4. Disparbud
5. Dinkes
6. Dishub
7. Bagian Humas
8. Diskominfostandi



PETA RELASI

DPMPTSP 05.01
PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB KOORDINATOR
PROMOSI PM

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

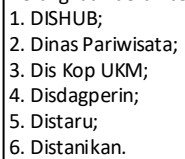
SUB KOORDINATOR
DEREGULASI PM

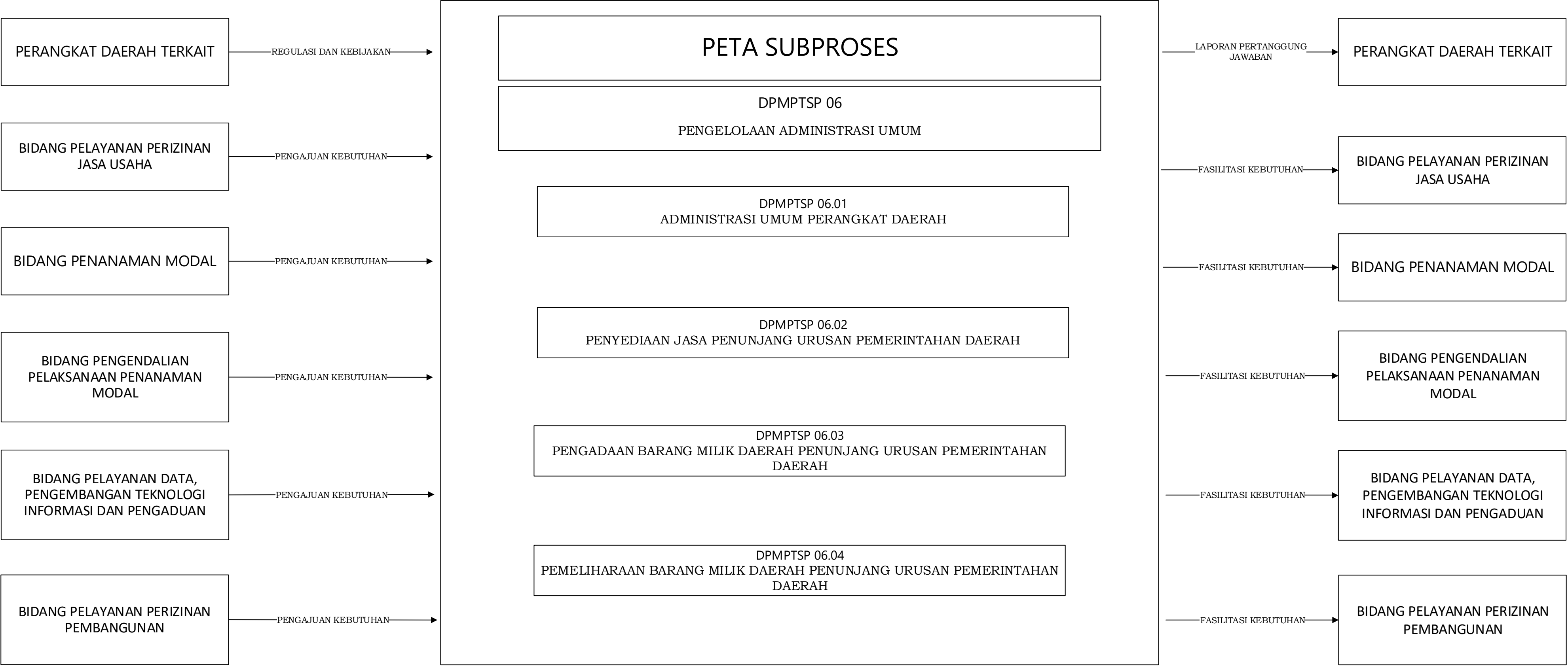
SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN IKLIM PM

SUB KOORDINATOR KEUANGAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota (Jumlah Event)





PETA RELASI

DPMPTSP 06.01

ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

KASUBAG UMPEG

KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA,
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGADUAN

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN JASA USAHA

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

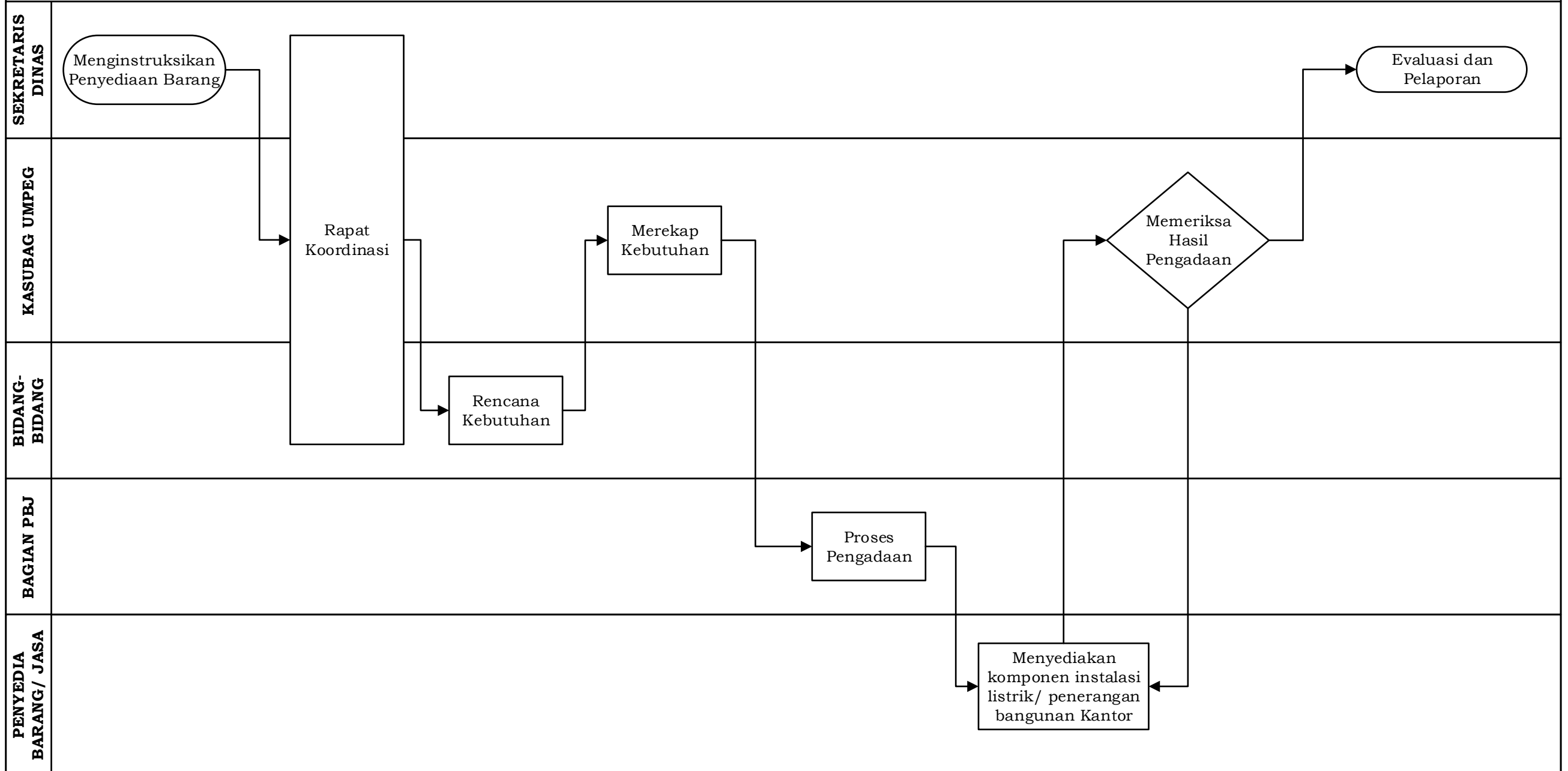
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN PEMBANGUNAN

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

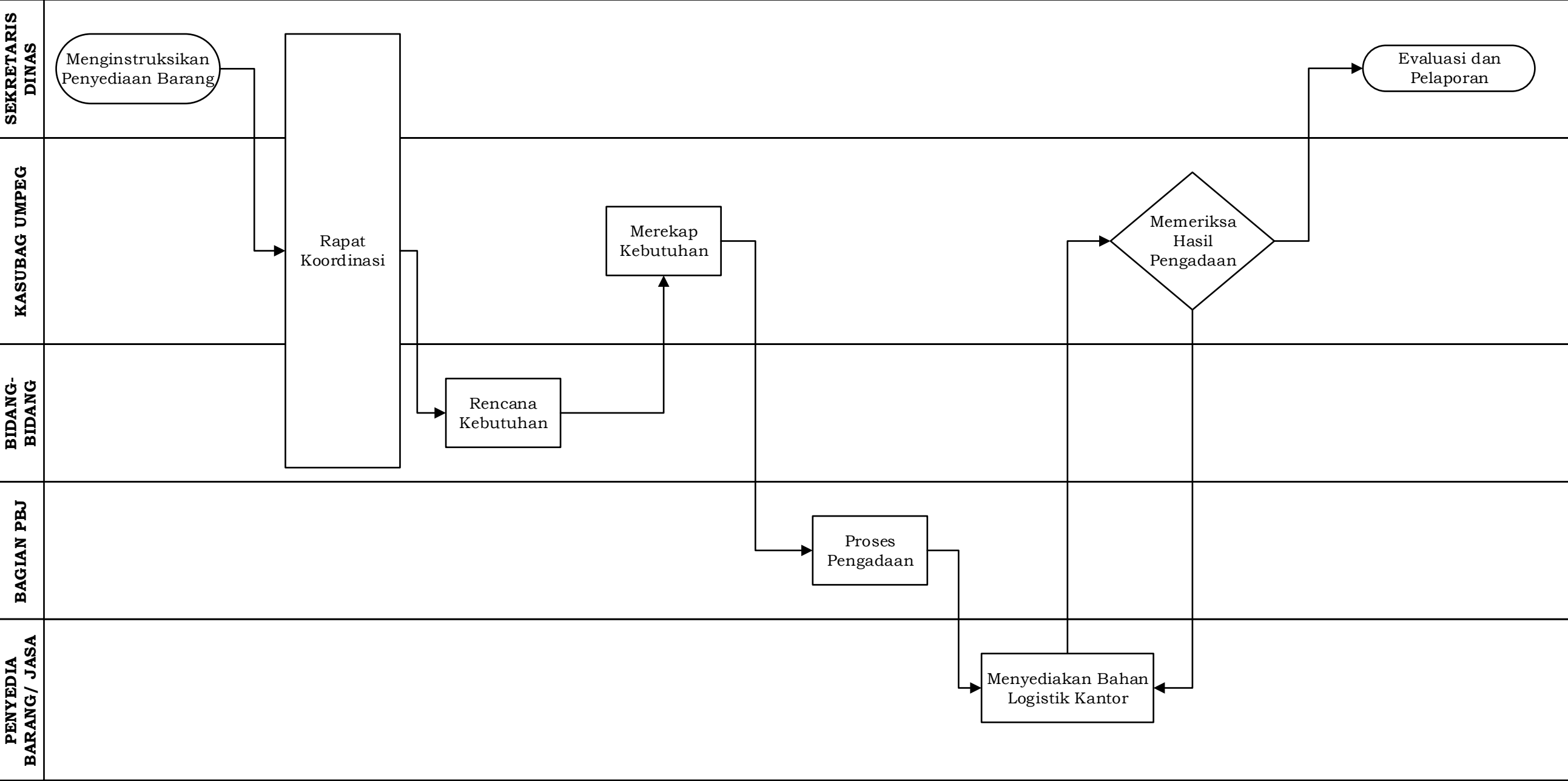
DPMPTSP 06.01 CFM 01

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR (JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR)



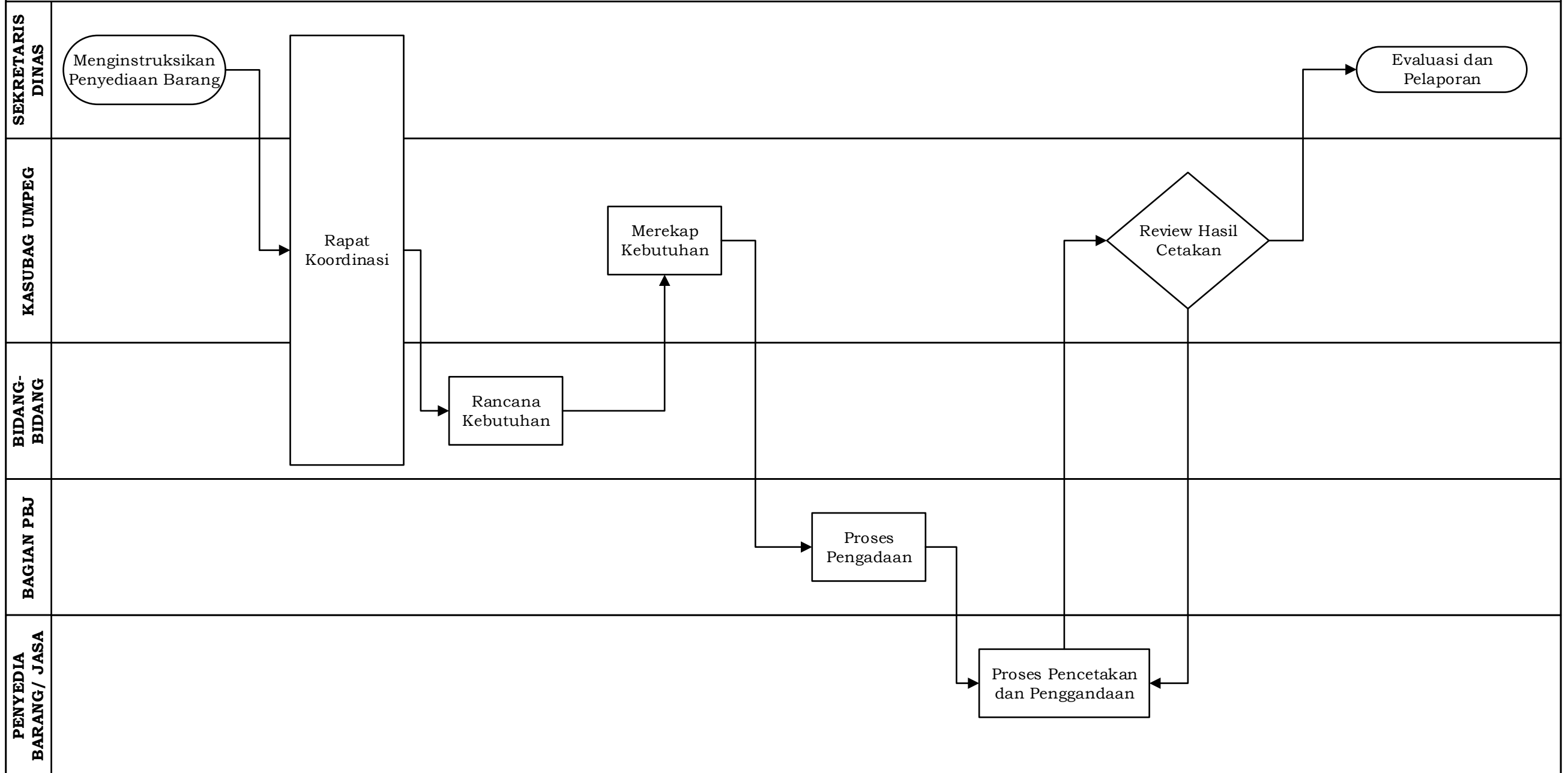
DPMPTSP 06.01 CFM 02

PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR (JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN)



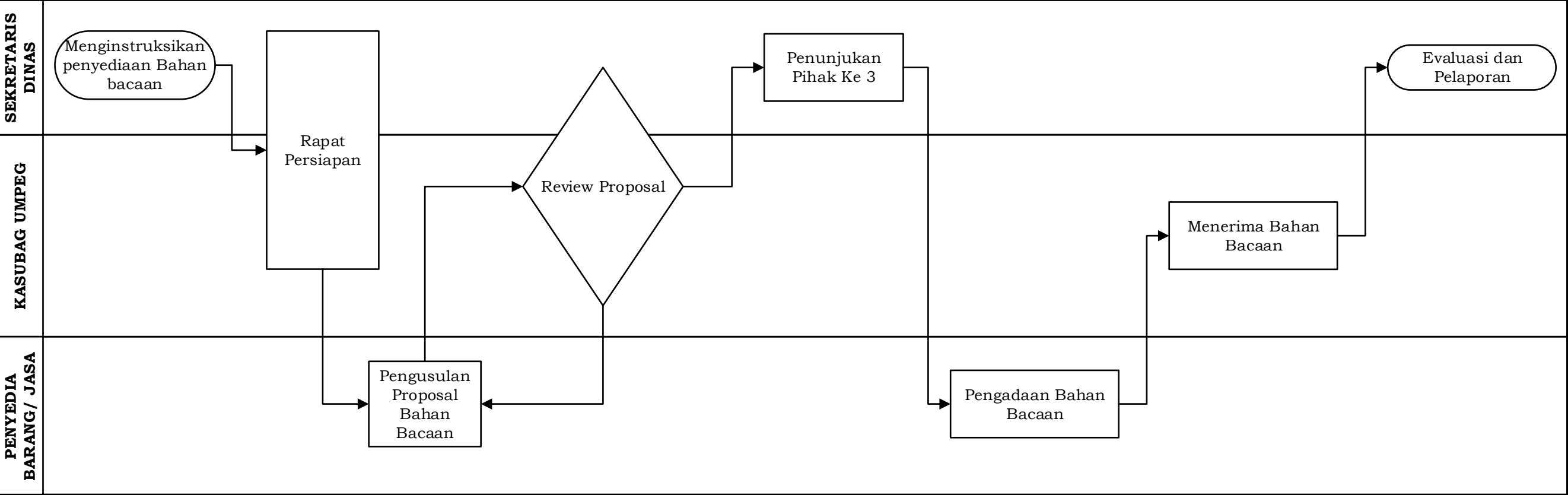
DPMPTSP 06.01 CFM 03

PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN (JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN)



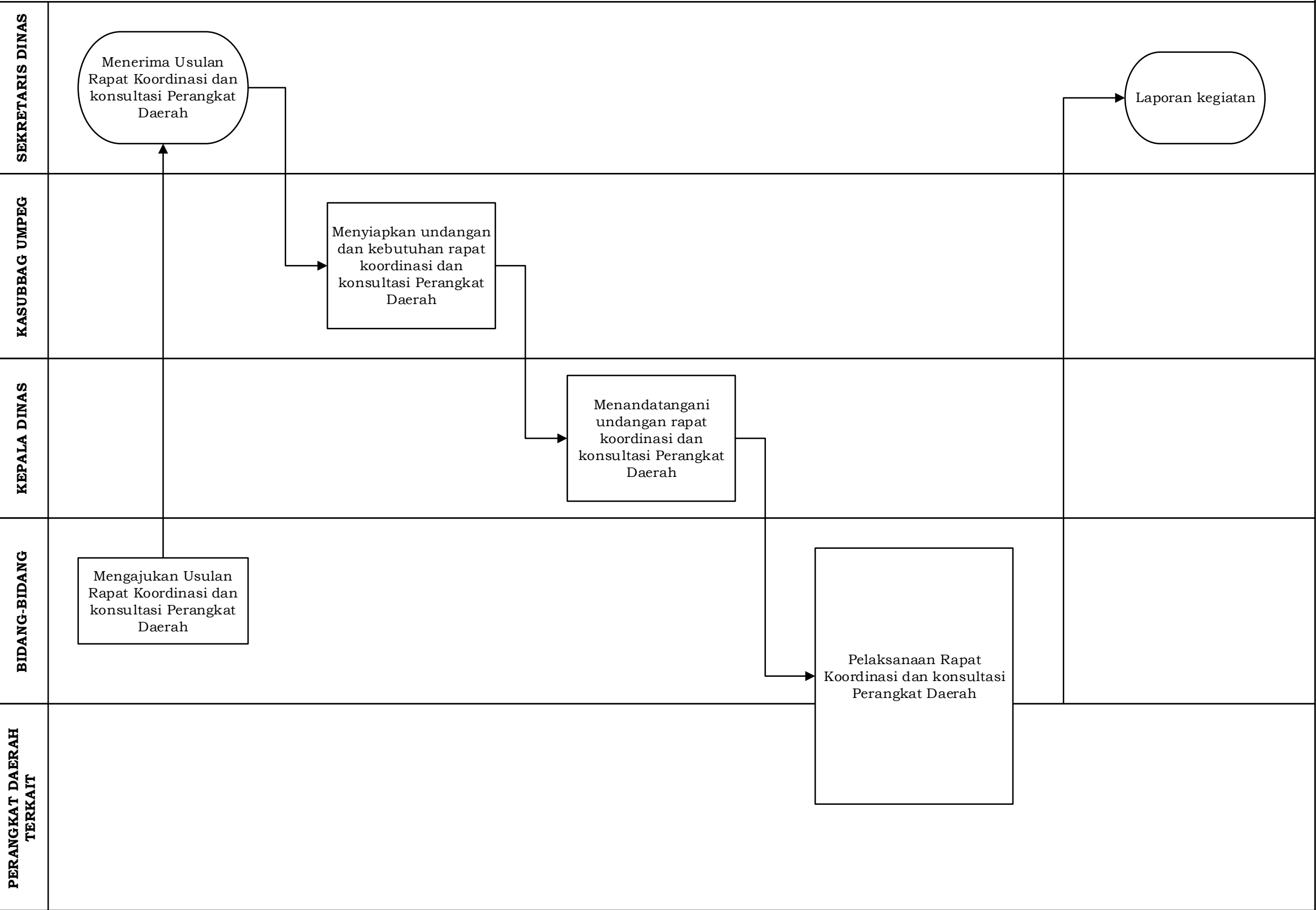
DPMPTSP 06.01 CFM 04

PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (JUMLAH BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)



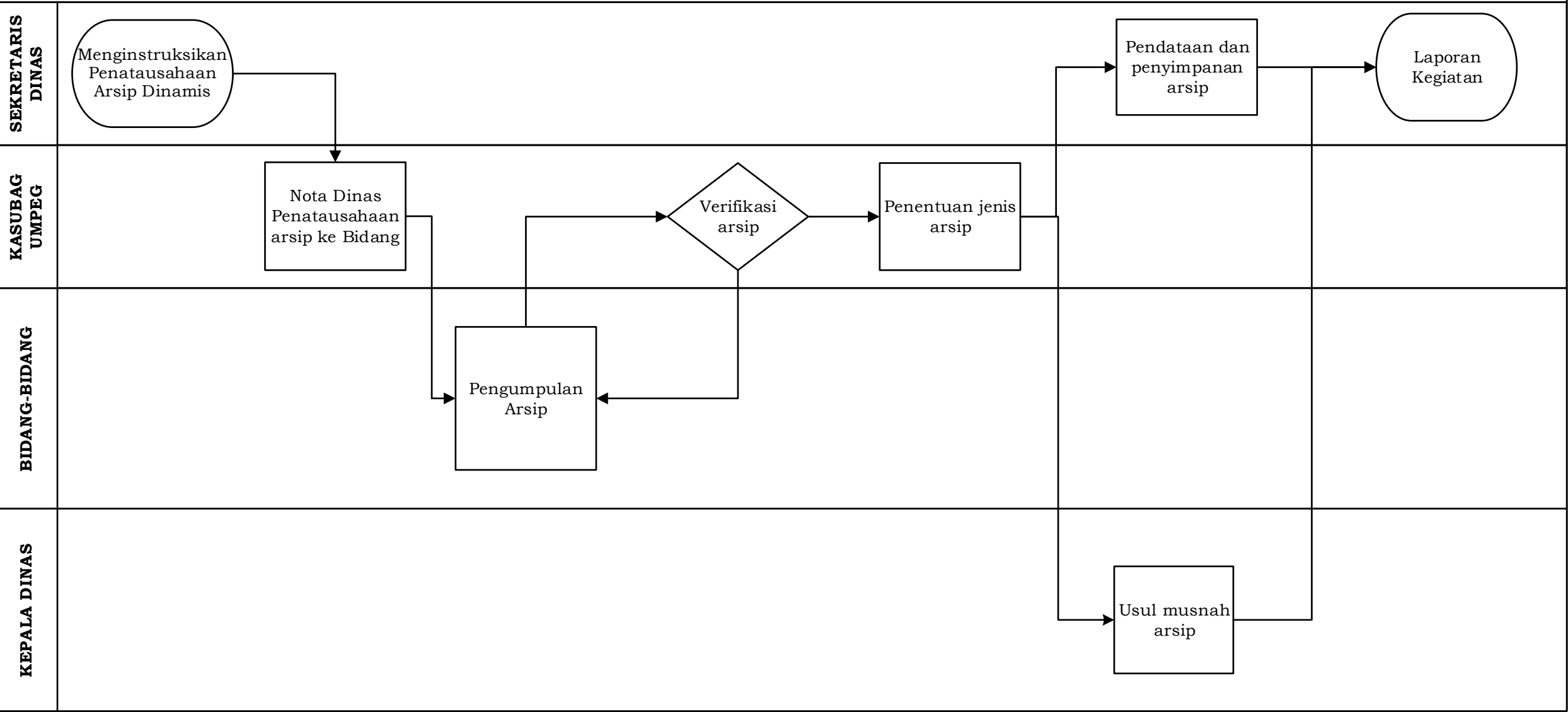
DPMPTSP 06.01. CFM 05

PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD (JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI)



DPMPTSP 06.01. CFM 06

PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS (PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS SKPD)



PETA RELASI

DPMPTSP 06.02

PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

KASUBAG UMPEG

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN JASA USAHA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA,
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGADUAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

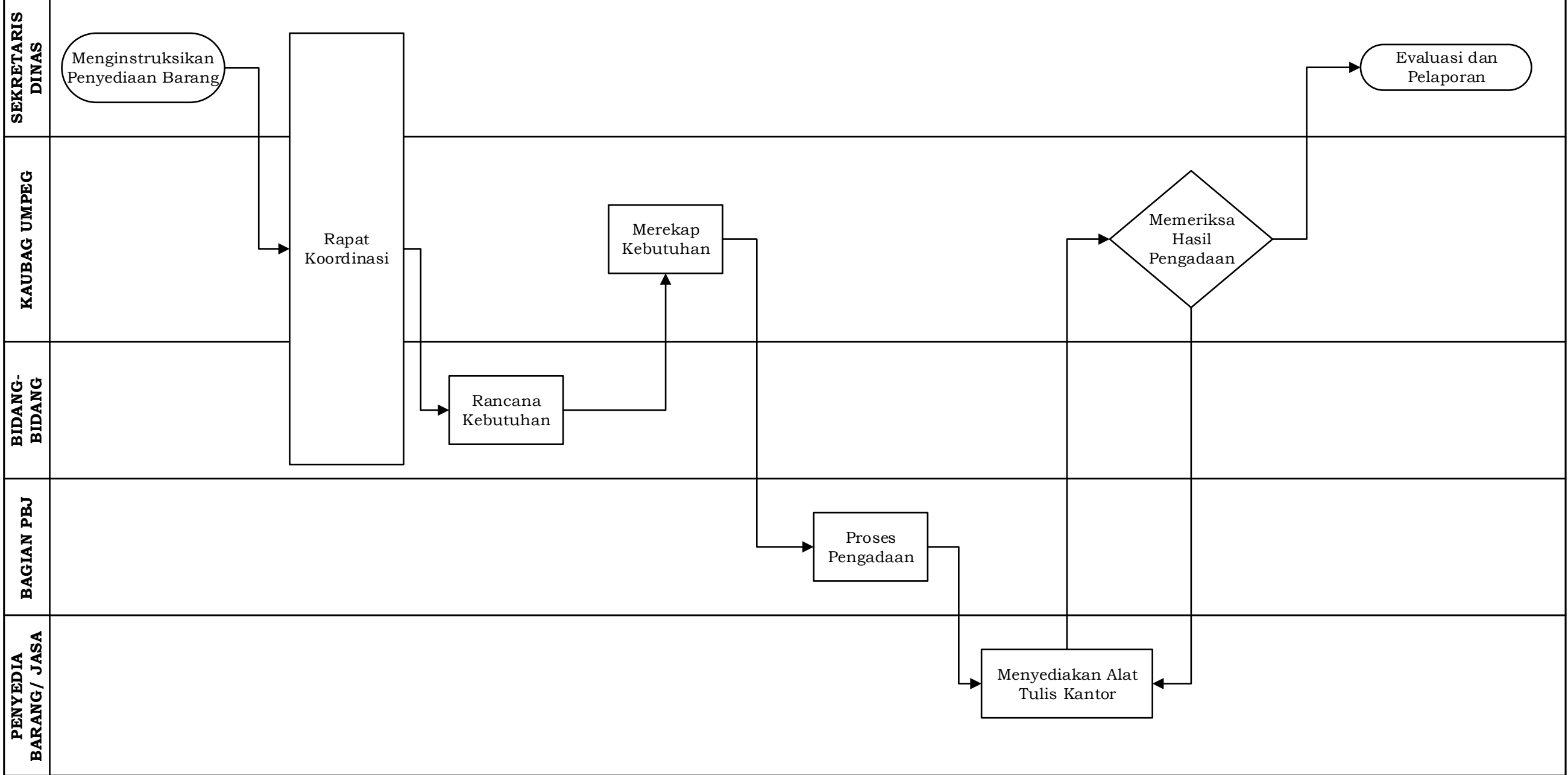
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN PEMBANGUNAN

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

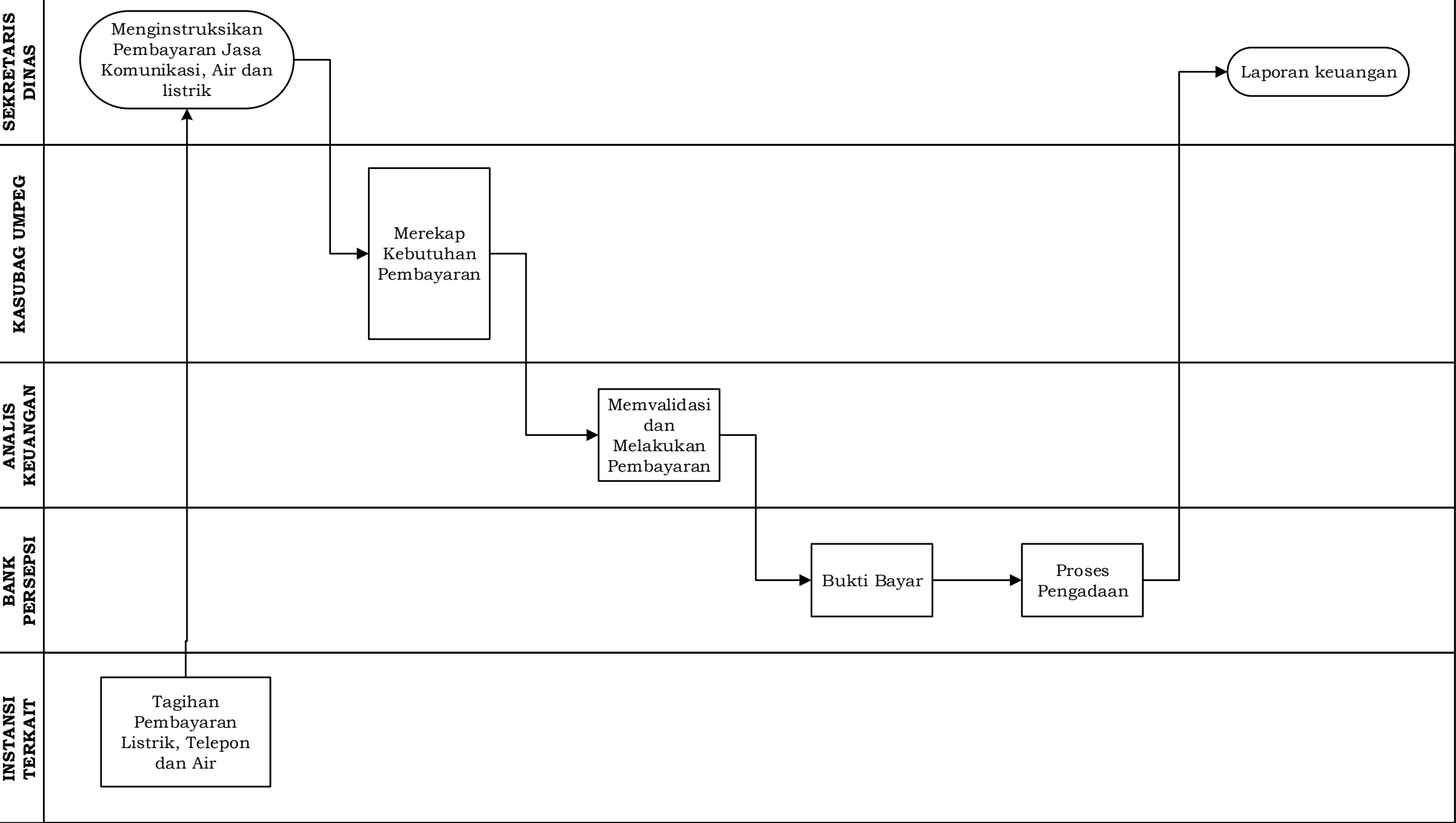
DPMPTSP 06.02 CFM 01

PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR (JUMLAH ATK)



DPMPTSP 06.02 CFM 02

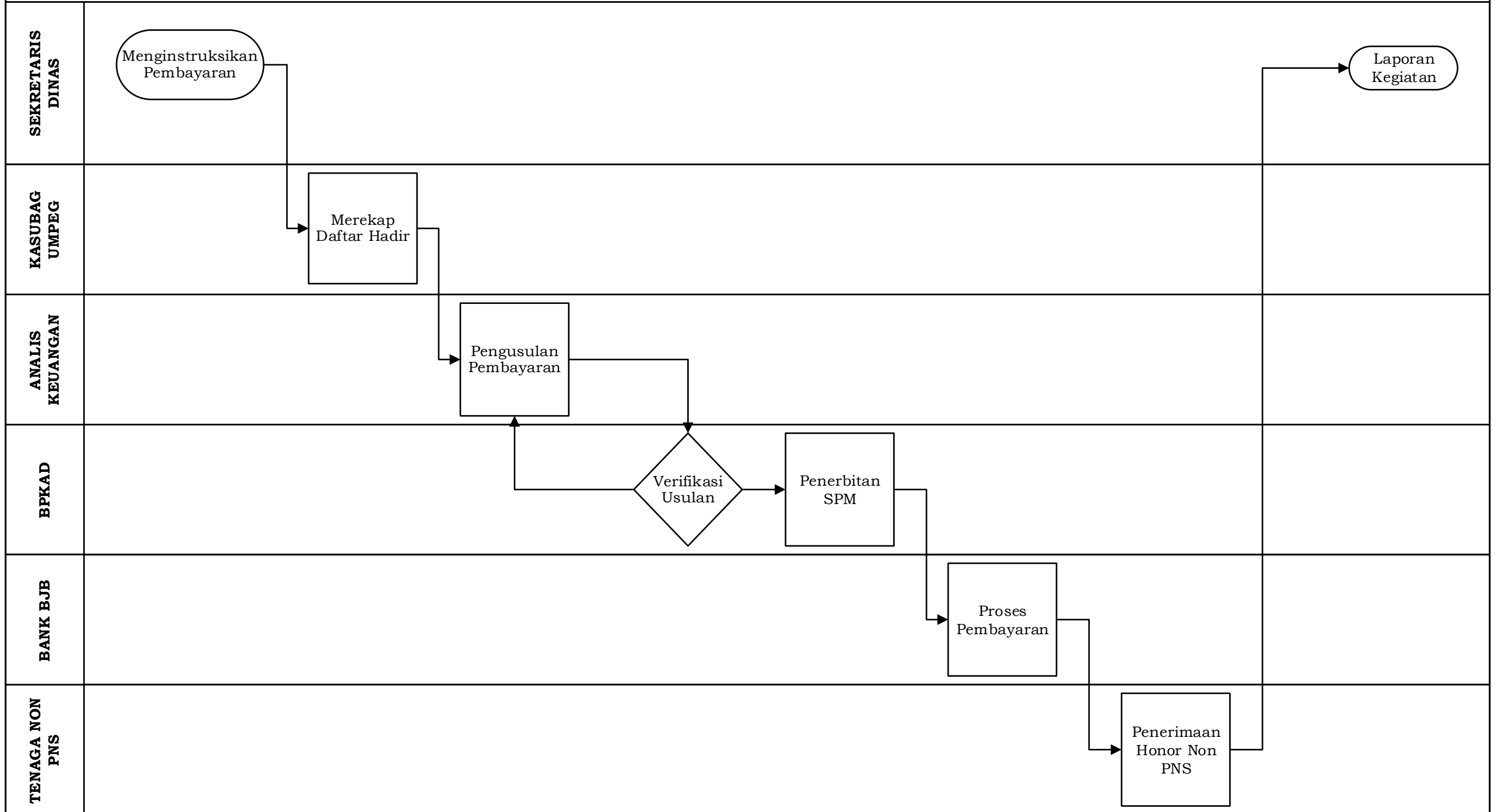
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK (JUMLAH REKENING TELEPON, INTERNET, AIR DAN LISTRIK)



Instansi Terkait:
1. PLN
2. Penyedia Jasa Telekomunikasi
3. Penyedia Jasa Air

DPMPTSP 06.02 CFM 03

PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR (JUMLAH JASA TENAGA NON PNS)



PETA RELASI

DPMPTSP 06.03

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

KASUBAG UMPEG

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN JASA USAHA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA,
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGADUAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

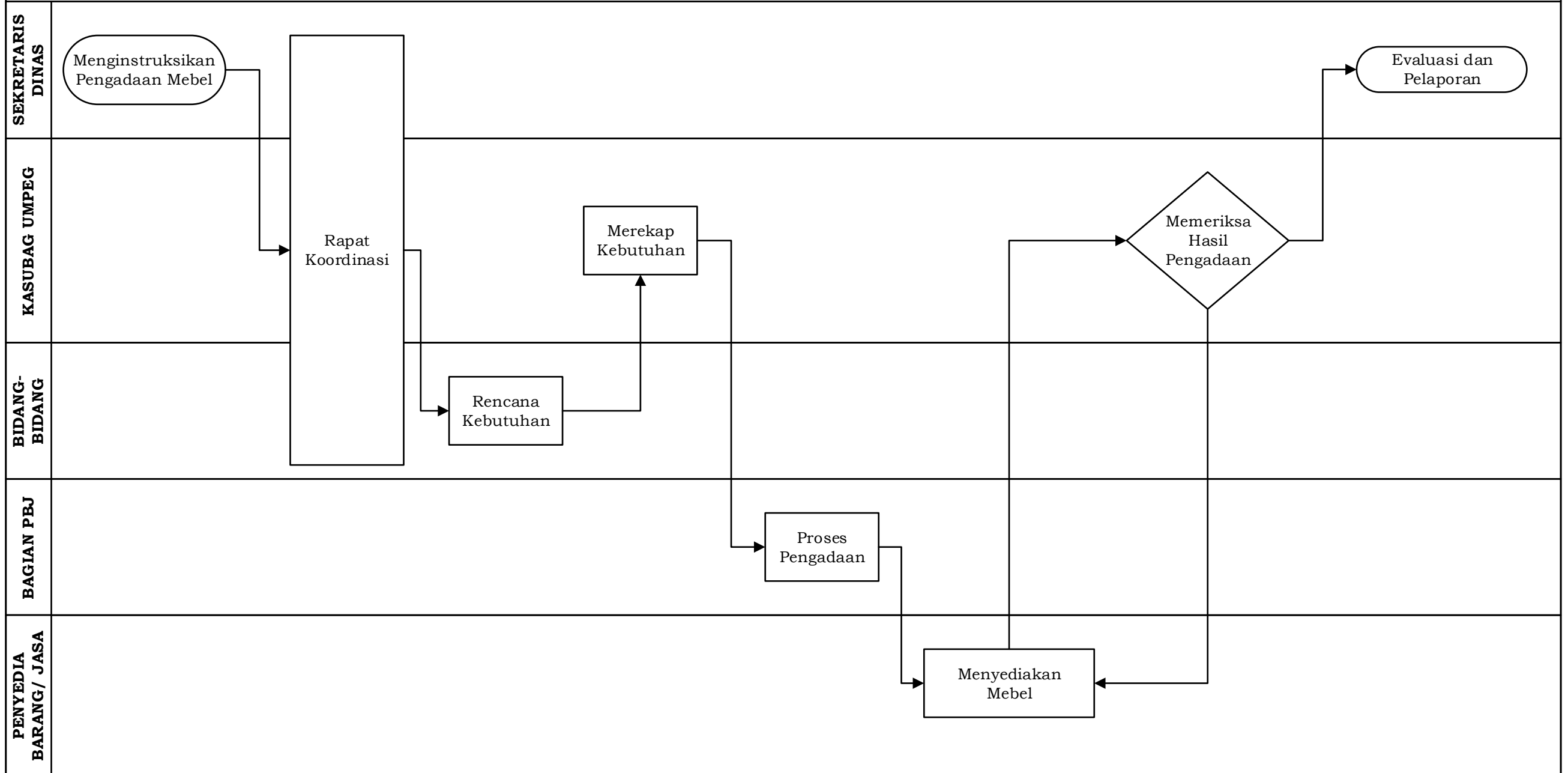
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN PEMBANGUNAN

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

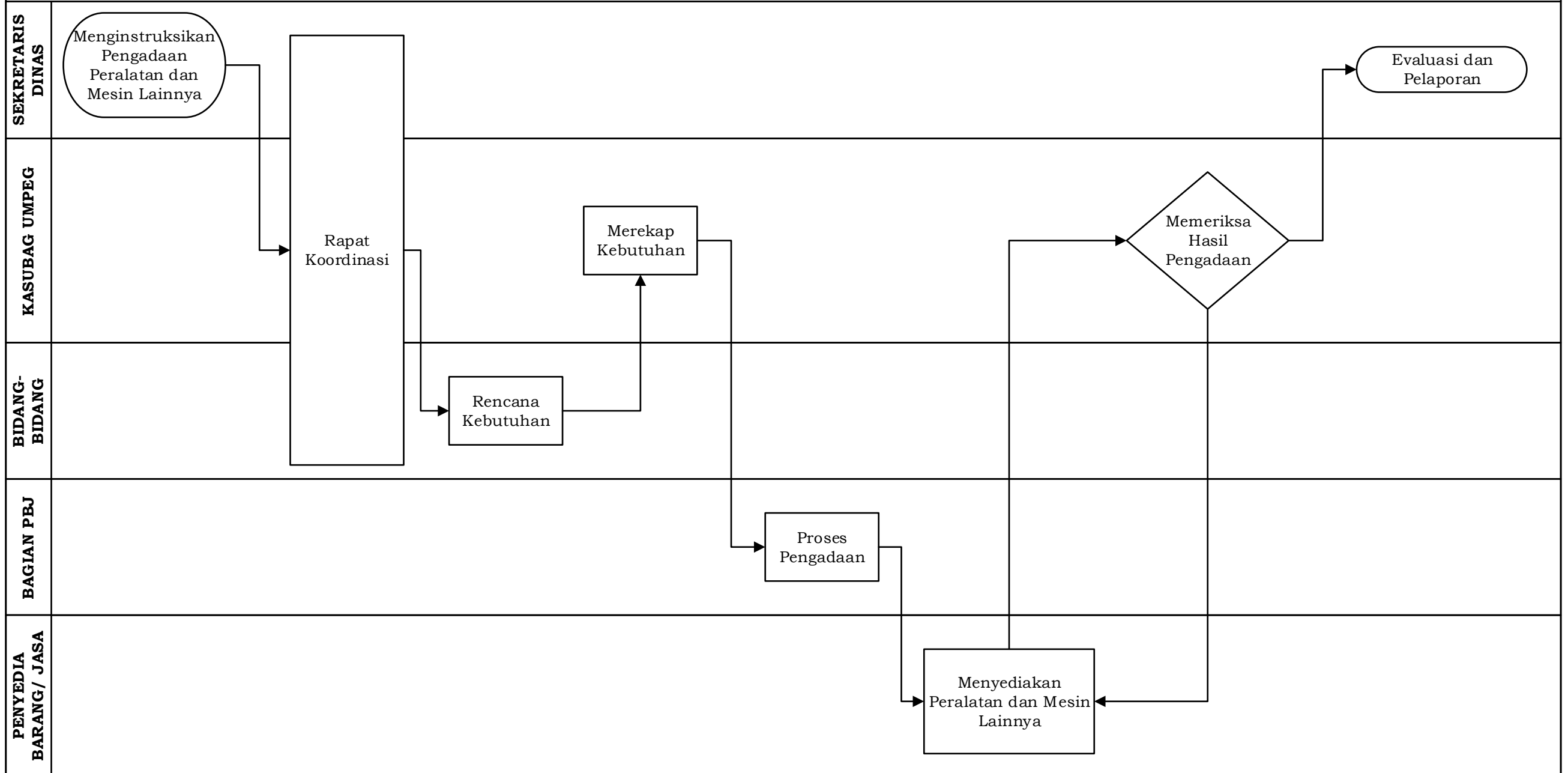
DPMPTSP 06.03 CFM 01

PENGADAAN MEBEL (JUMLAH MEBEL)	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100



DPMPTSP 06.03 CFM 02

PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (JUMLAH PERALATAN DAN MESIN LAINNYA)



PETA RELASI

DPMPTSP 06.04

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

KASUBAG UMPEG

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN JASA USAHA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA,
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGADUAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

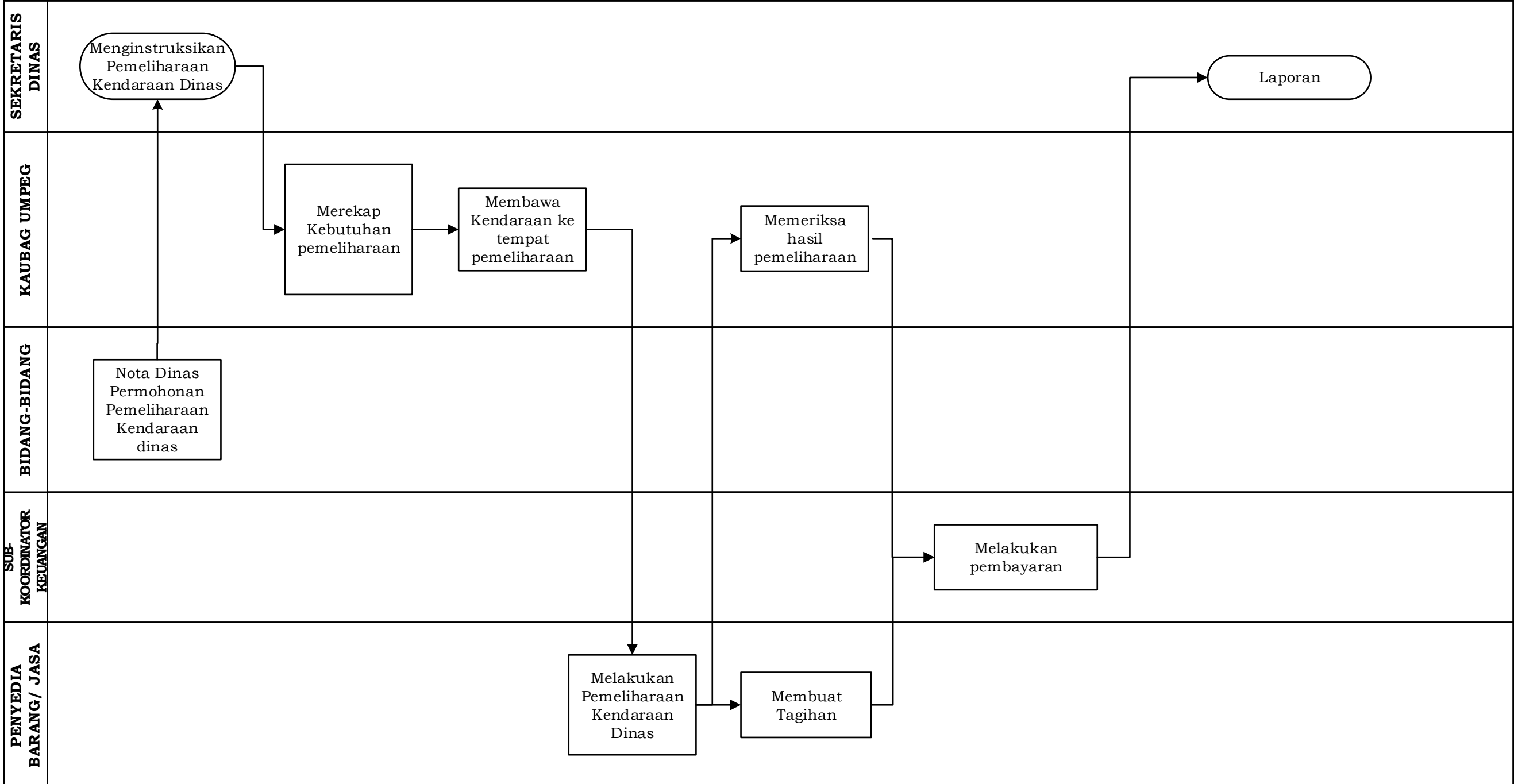
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN PEMBANGUNAN

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

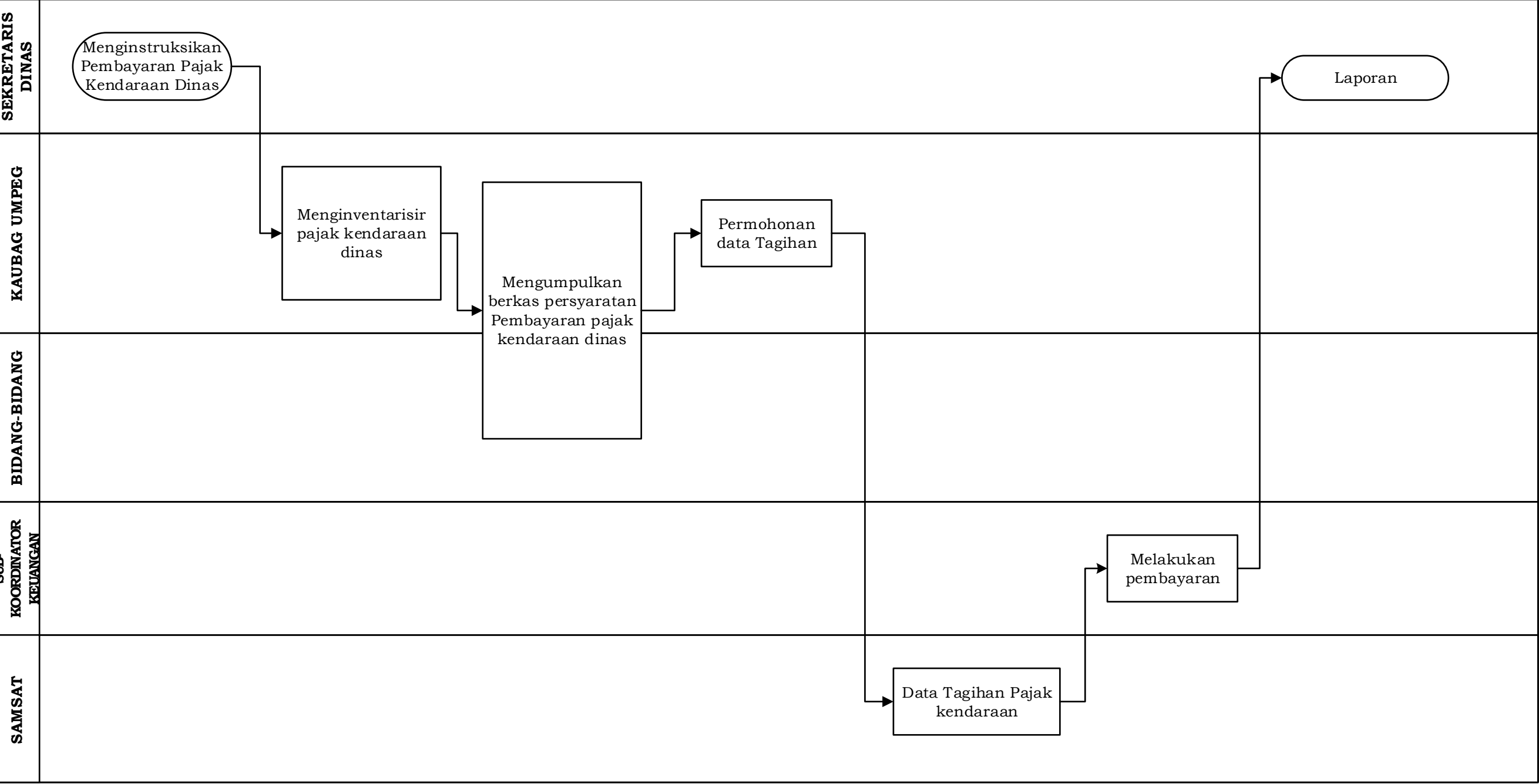
DPMPTSP 06.04 CFM 01

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN (PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS)



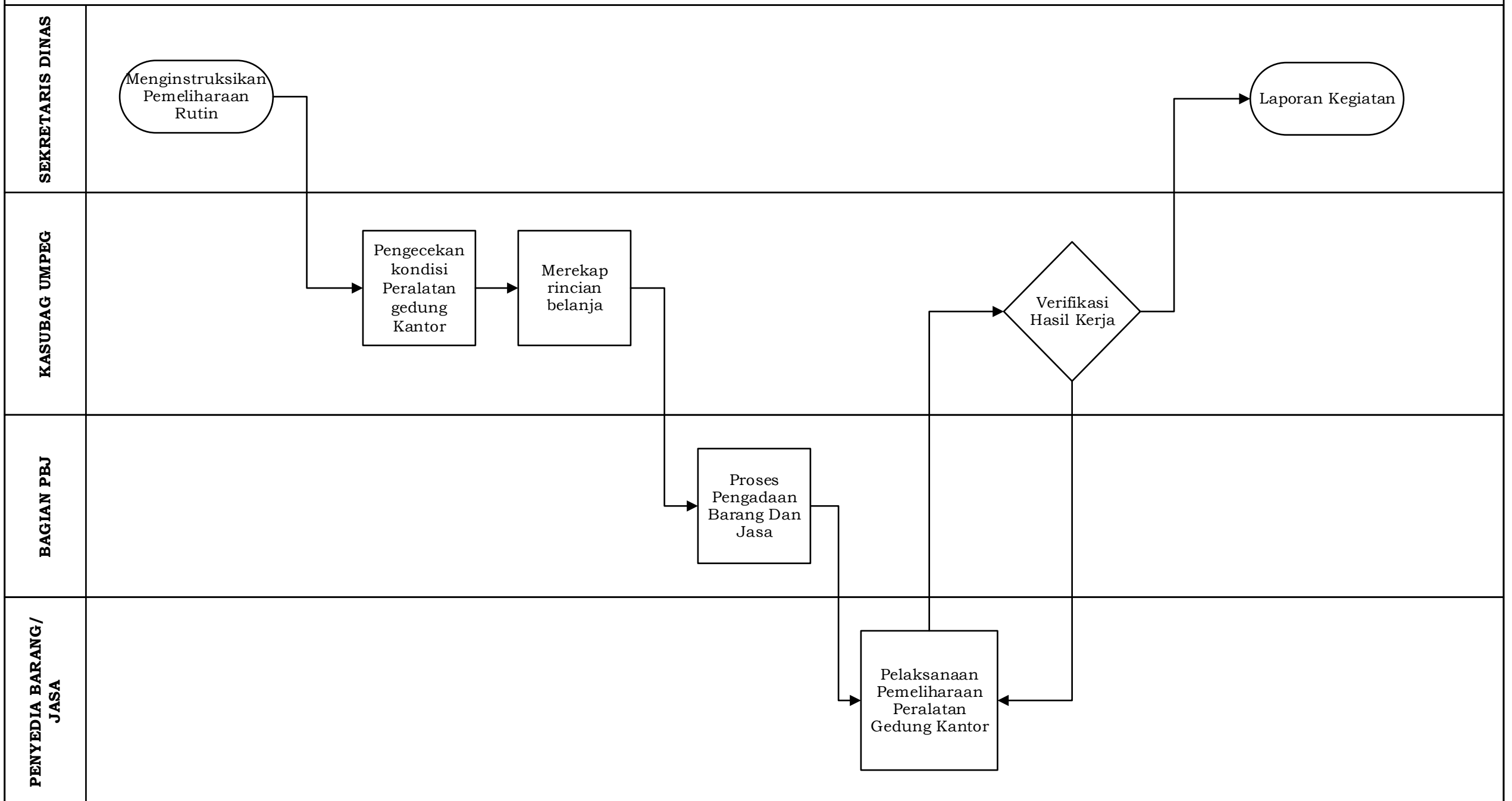
DPMPTSP 06.04 CFM 02

PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
(PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN DINAS)



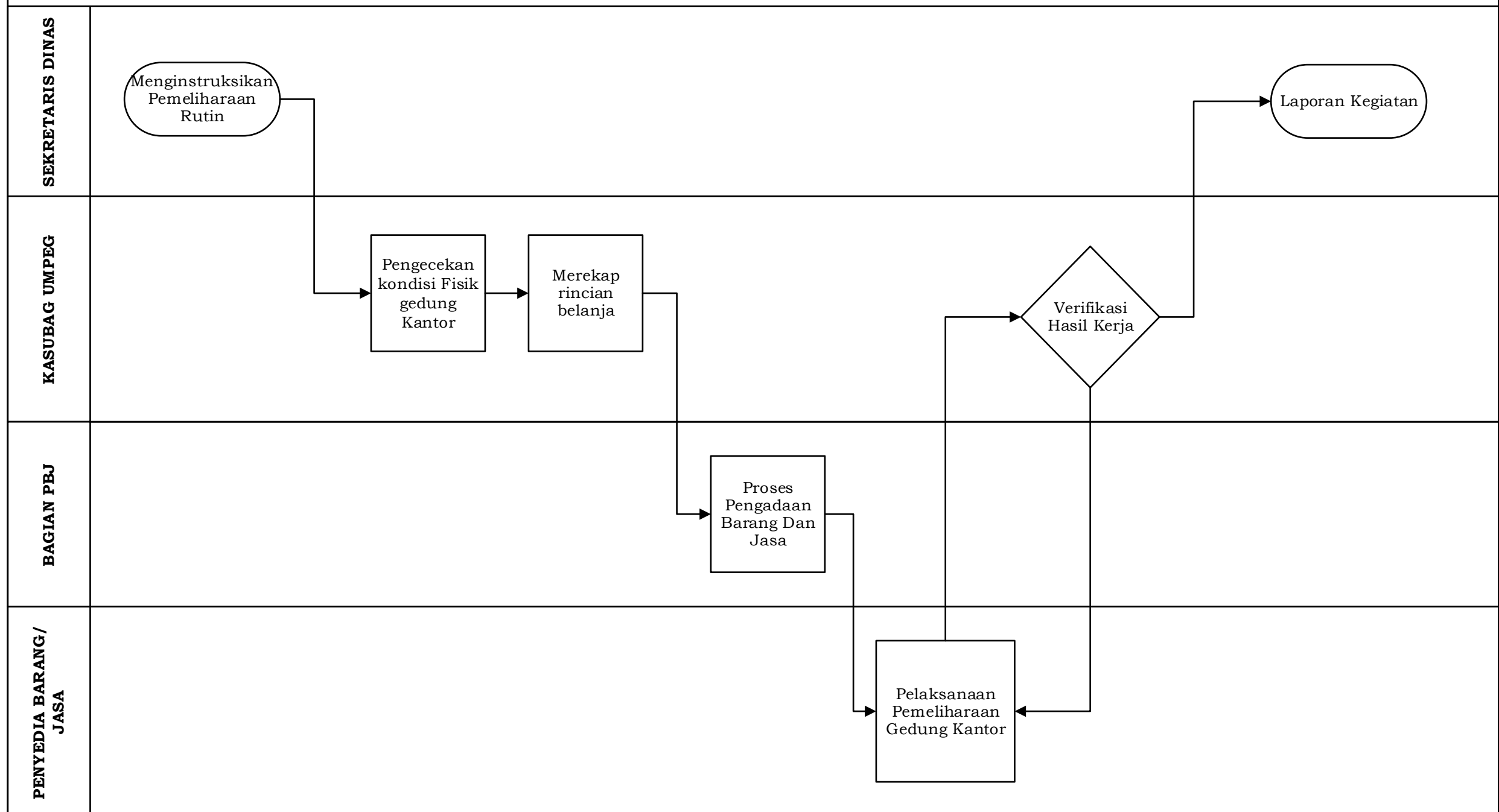
DPMPTSP 06.04 CFM 03

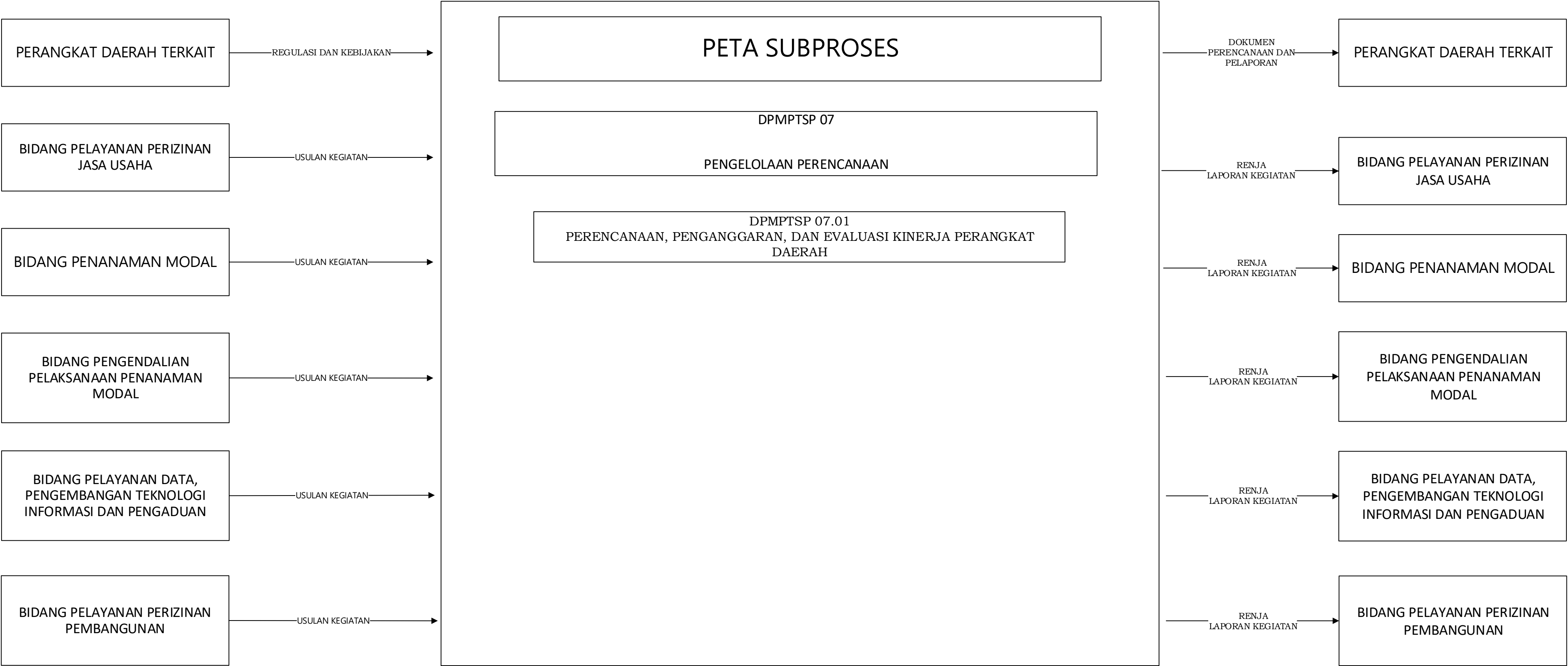
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA (JUMLAH PEMELIHARAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR)



DPMPTSP 06.04 CFM 04

PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA (JUMLAH PEMELIHARAAN DAN PENATAAN GEDUNG KANTOR)





PETA RELASI

DPMPTSP 07.01

PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN JASA USAHA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA,
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGADUAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

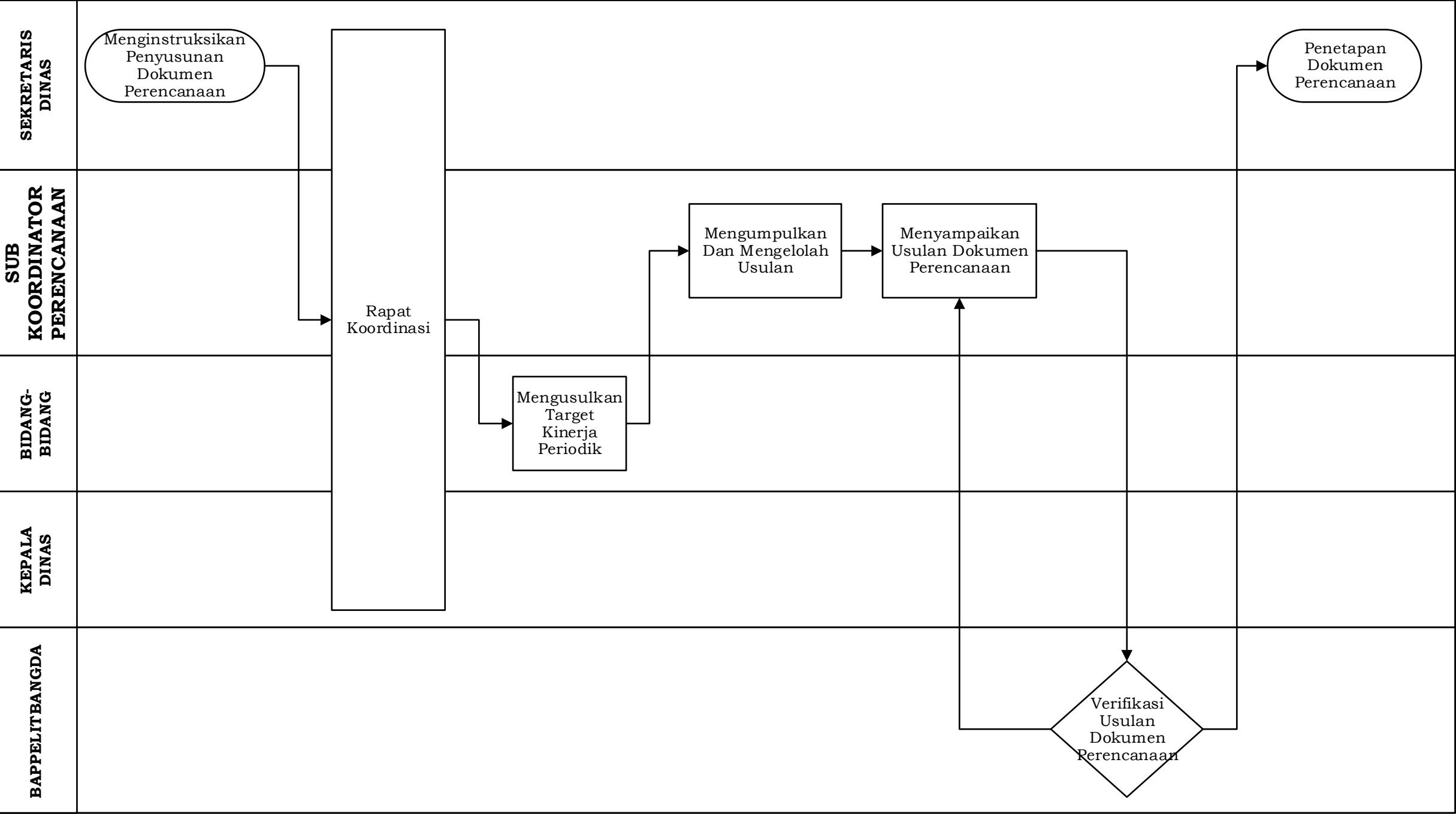
KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN PEMBANGUNAN

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

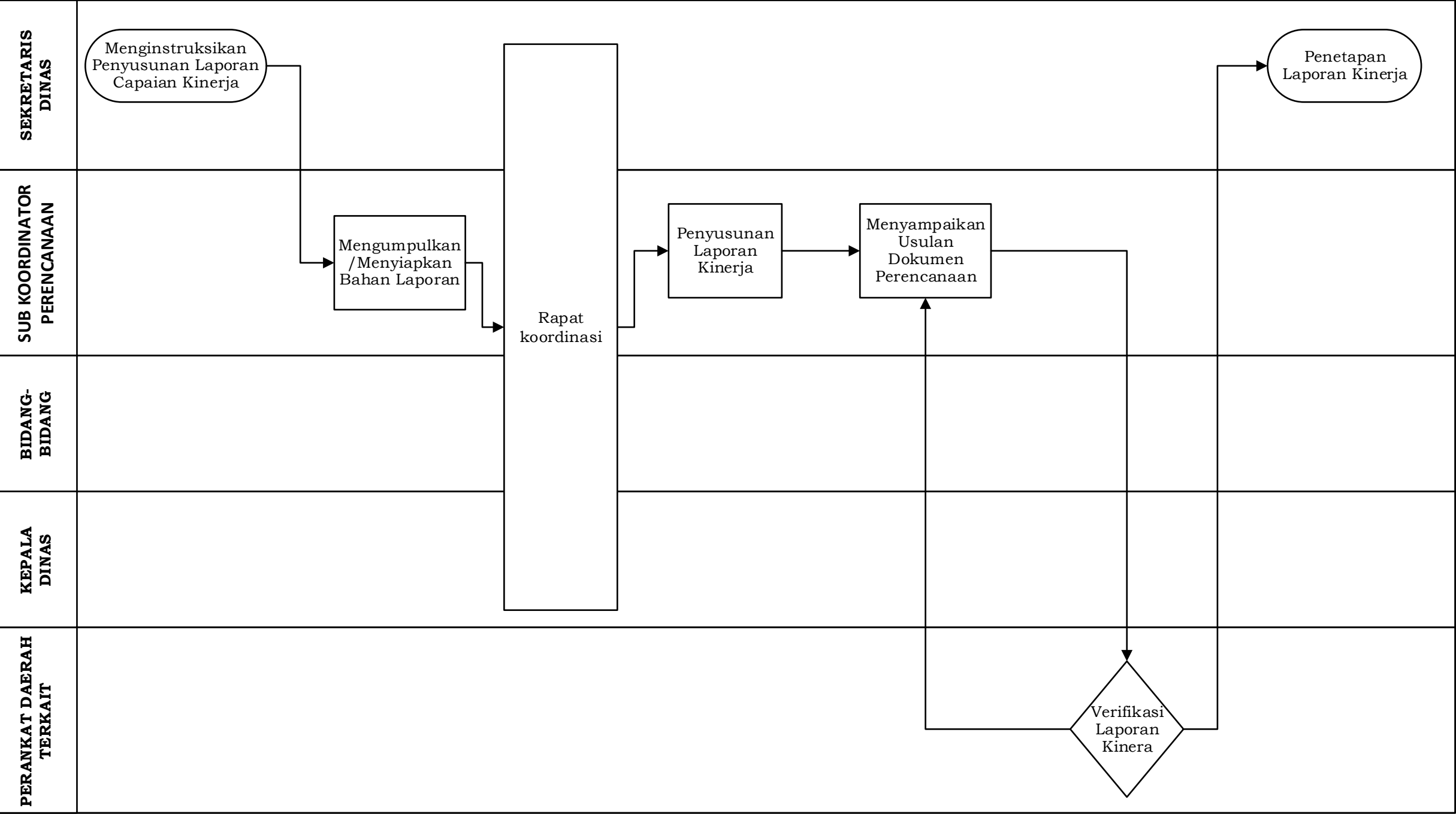
DPMPTSP 07.01 CFM 01

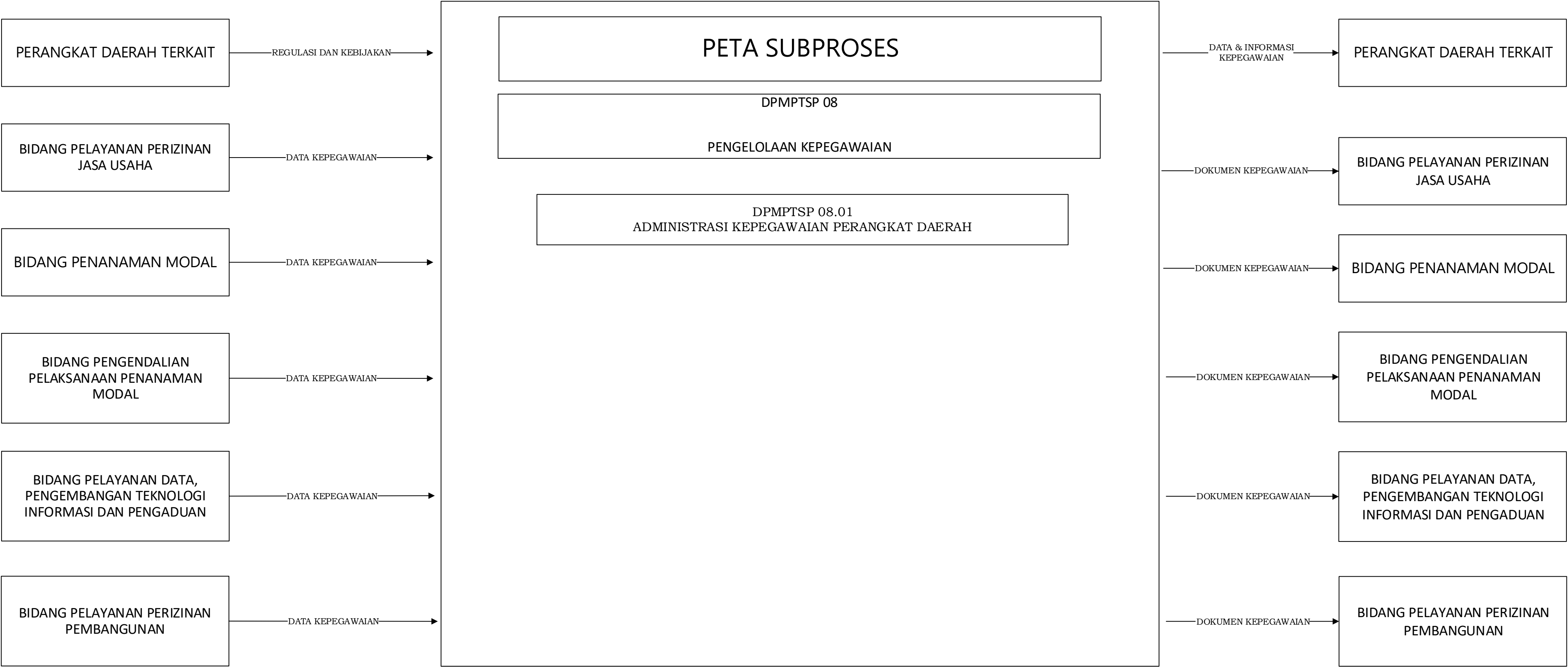
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTISAR REALISASI KINERJA SKPD (PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN)



DPMPTSP 07.01 CFM 02

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKTISAR REALISASI KINERJA SKPD (PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN)





PETA RELASI

DPMPTSP 08.01

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

KASUBAG UMPEG

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN JASA USAHA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA,
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGADUAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

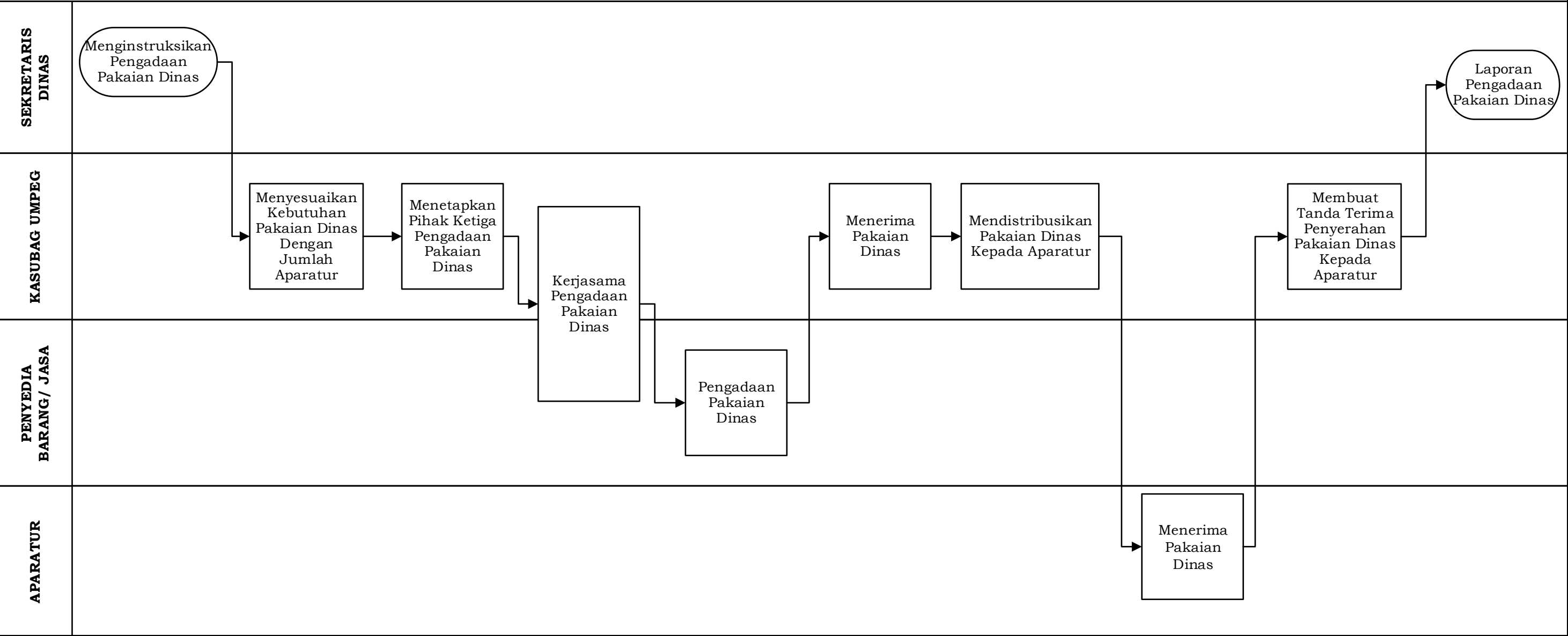
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN PEMBANGUNAN

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

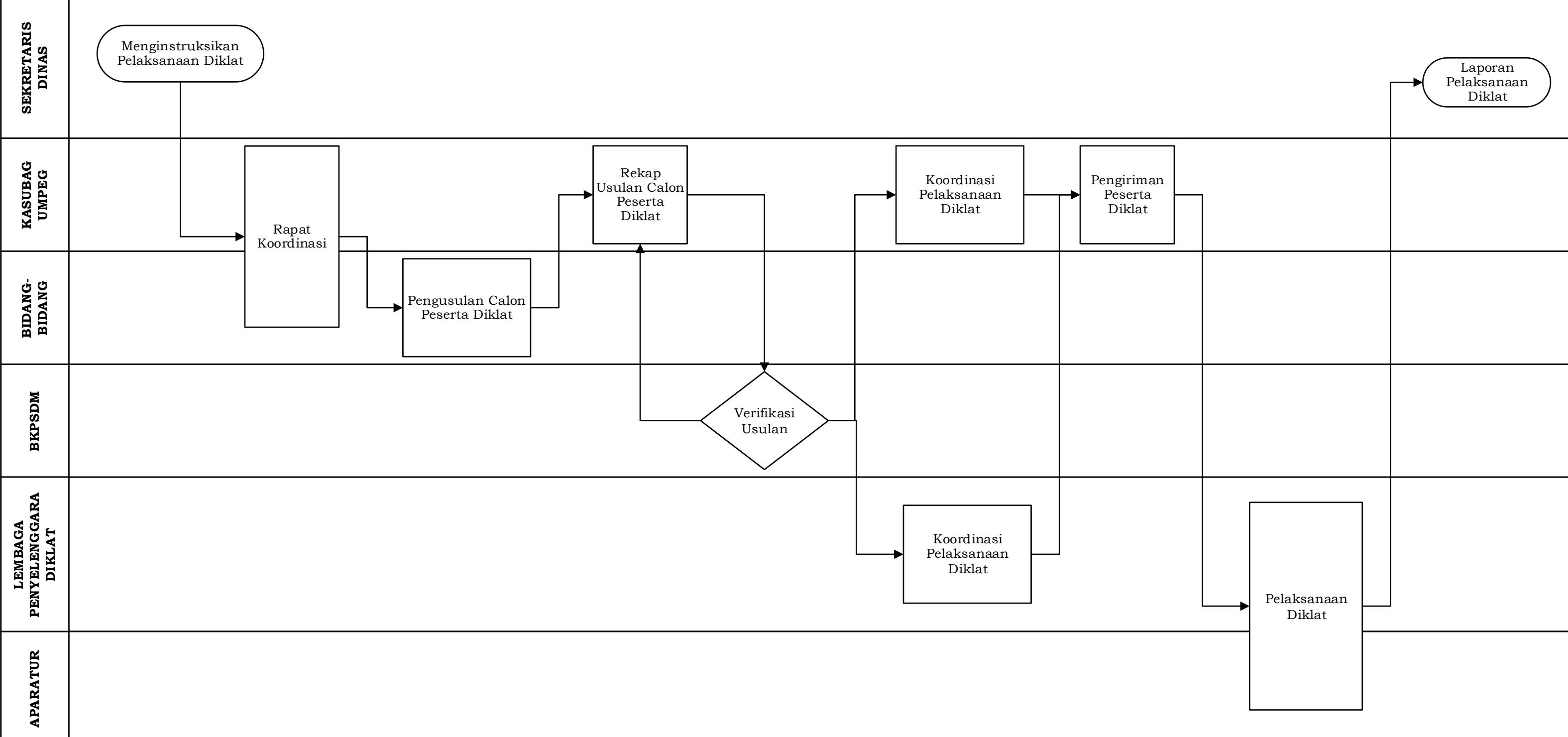
DPMPTSP 08.01 CFM01

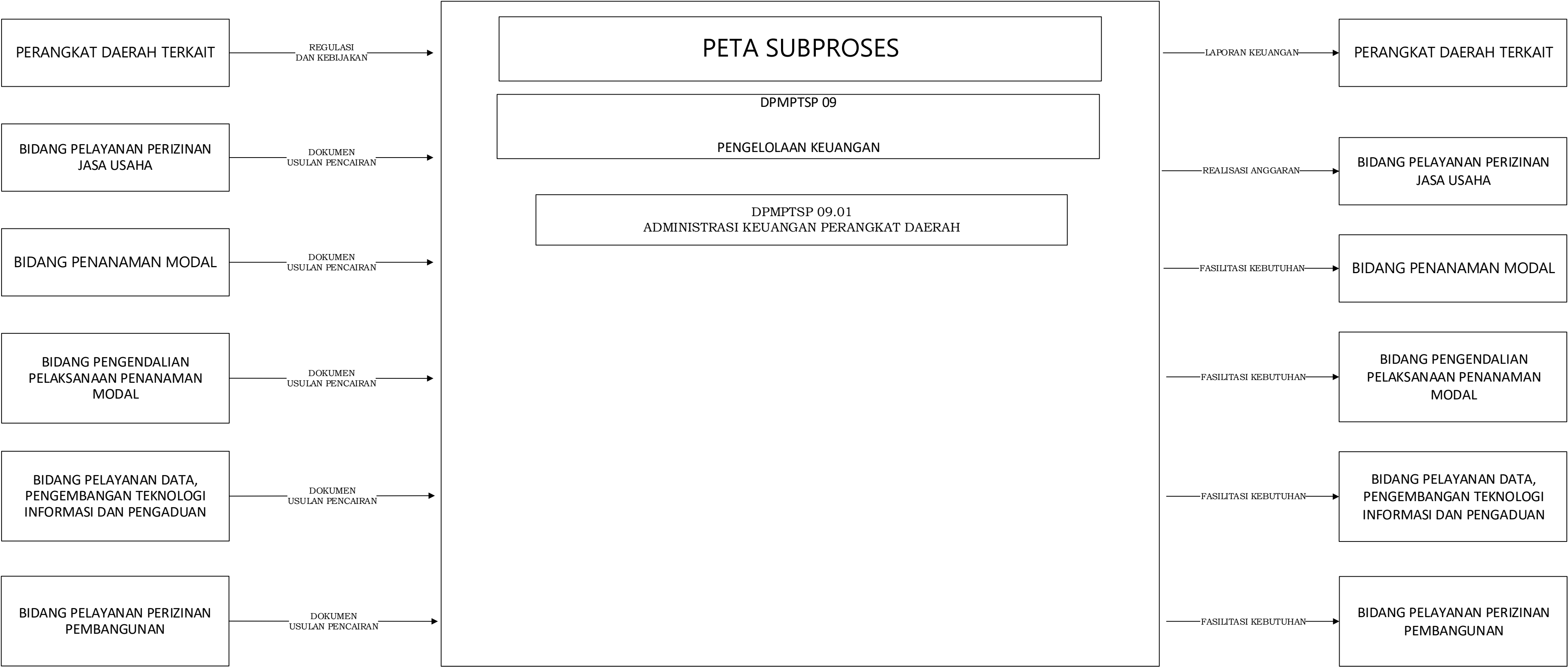
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT PERLENGKAPANNYA (JUMLAH PAKAIAN DINAS)



DPMPTSP 08.01 CFM 02

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI (JUMLAH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL)





PETA RELASI

DPMPTSP 09.01

ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

SEKRETARIS DINAS

KEPALA DINAS

SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN

KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN JASA USAHA

KEPALA BIDANG PELAYANAN DATA,
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGADUAN

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

KEPALA BIDANG PENANAMAN
MODAL

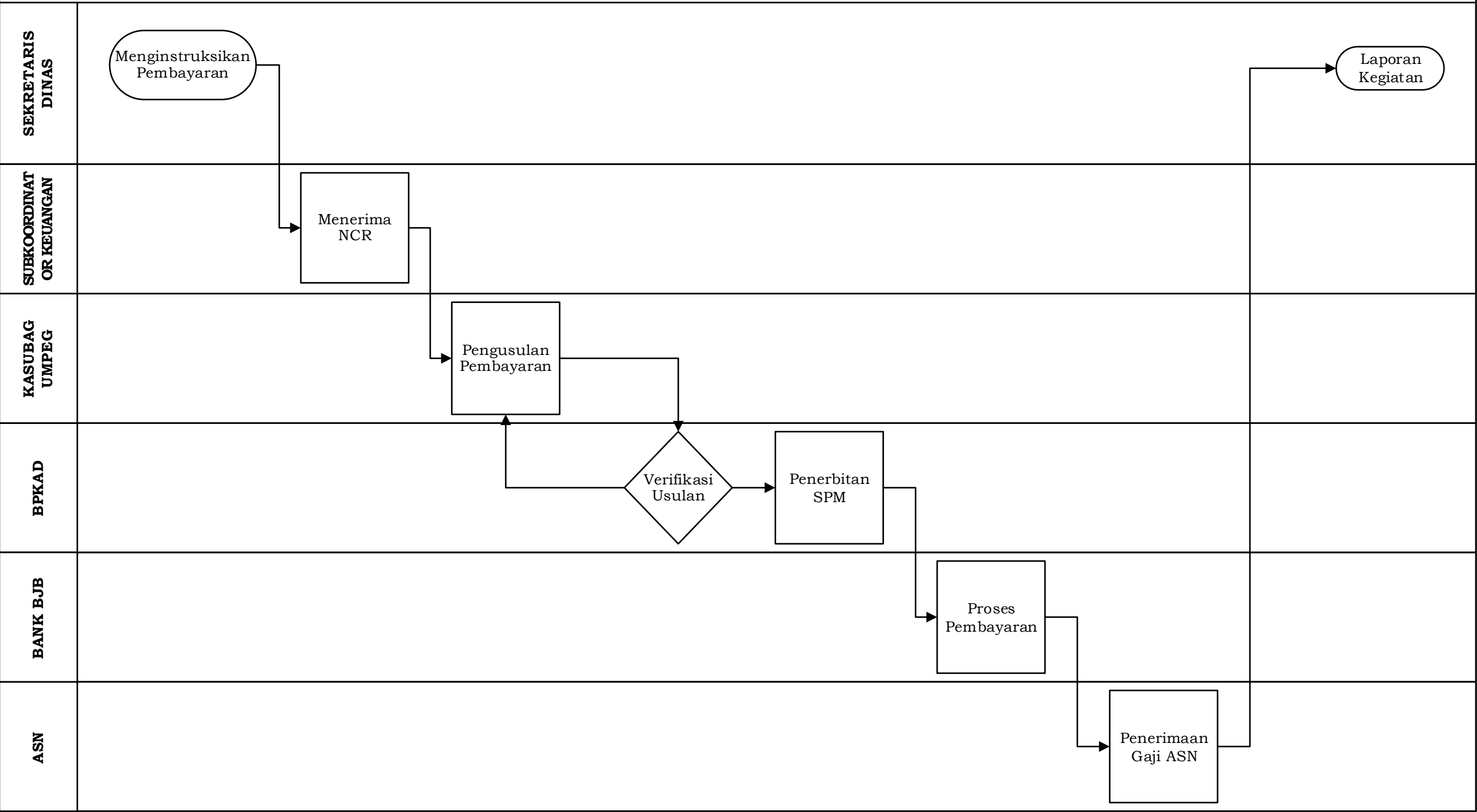
KEPALA BIDANG PELAYANAN
PERIZINAN PEMBANGUNAN

KASUBAG UMPEG

SUB KOORDINATOR
KEUANGAN

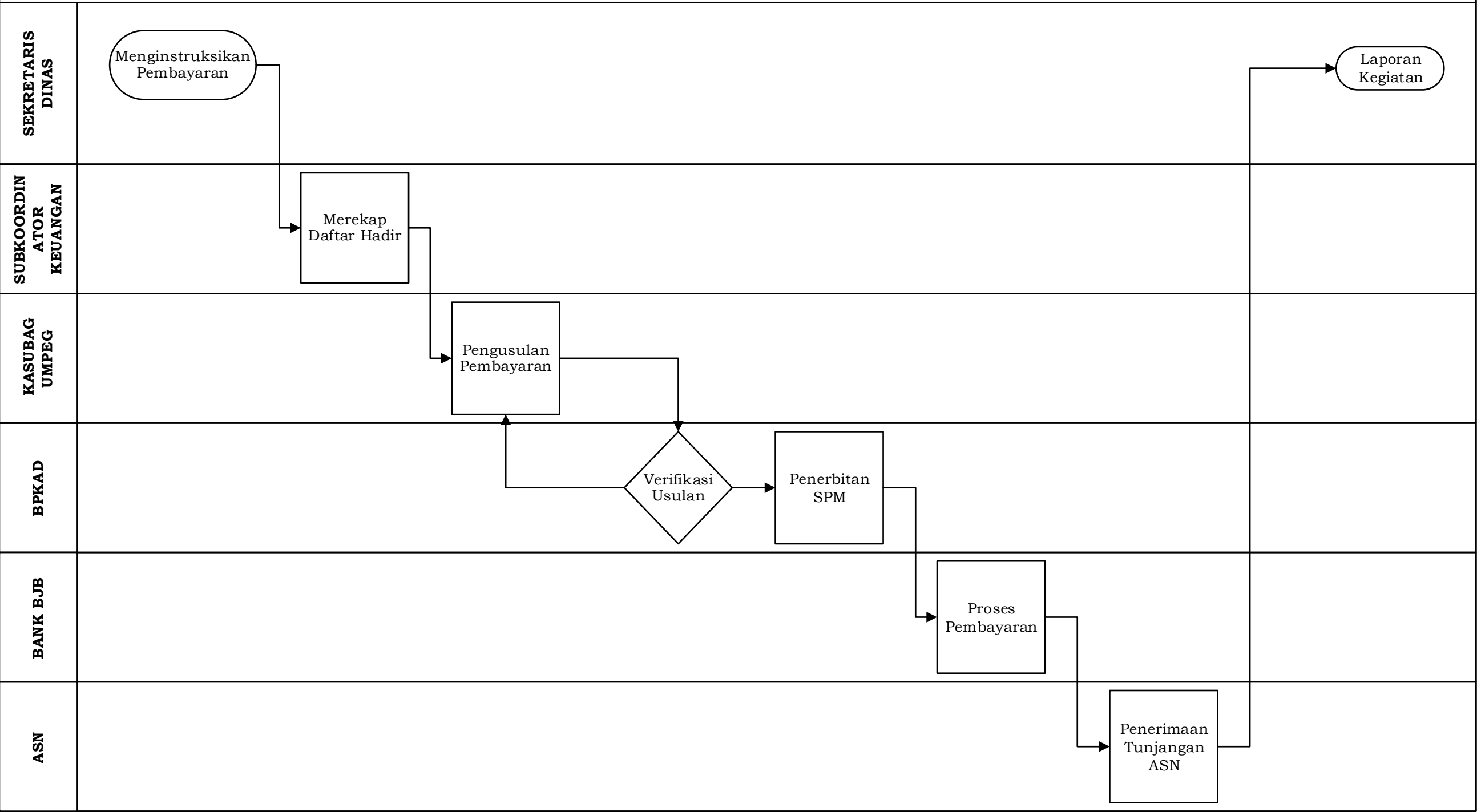
DPMPTSP 09.01 CFM 01

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (GAJI ASN)

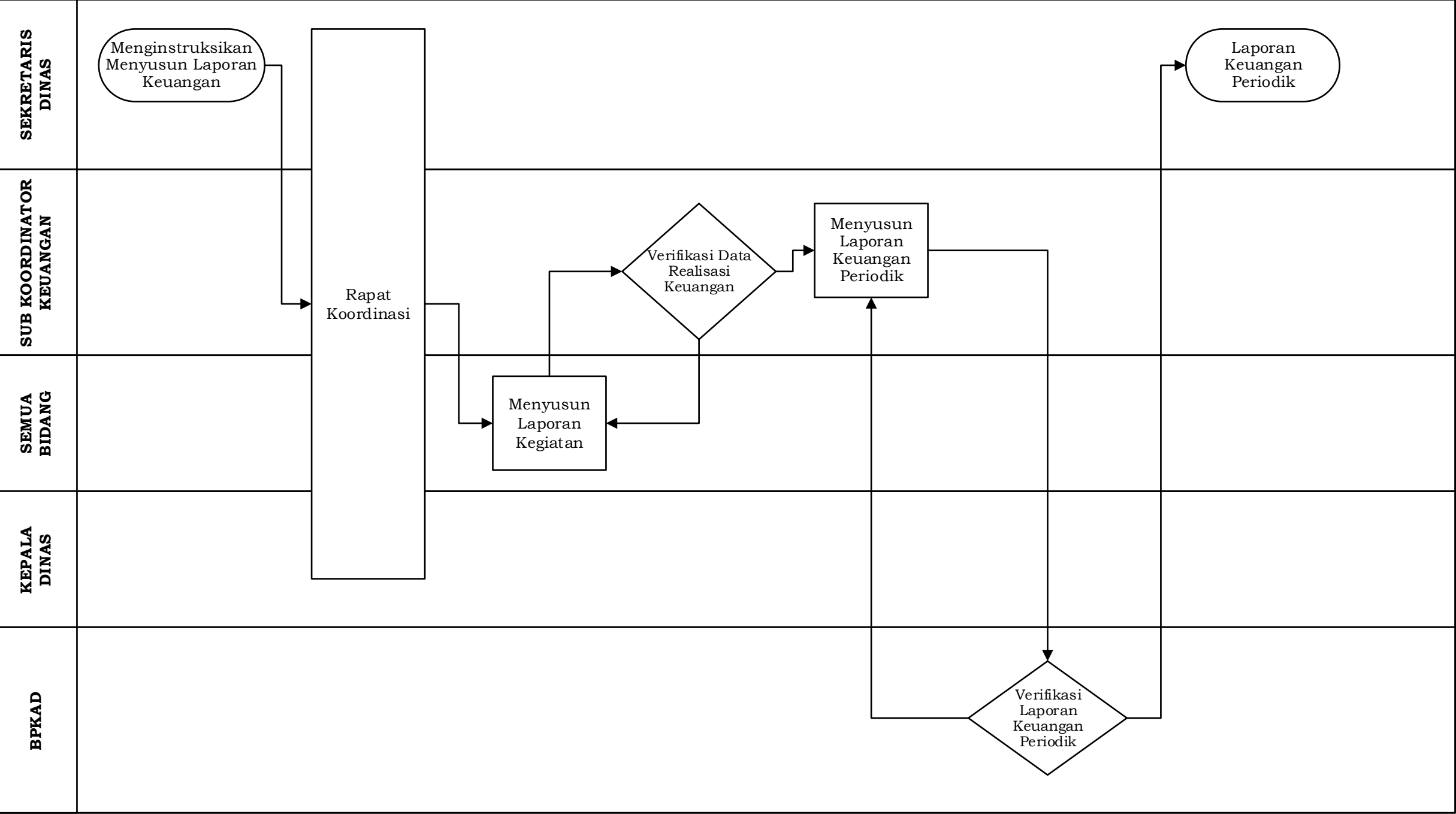


DPMPTSP 09.01 CFM 02

PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN (TUNJANGAN ASN)



KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD (JUMLAH LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN)



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BEKASI



LINTONG DIANTO PUTRA

**LEMBAR PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Tim Bagian Organisasi :

TELAH DISUSUN OLEH DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

1. Nama : Nur Laela Puspita Sari, S.STP.,
M.Si
Nip : 19810405 199912 2 002
Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda Sub
Koordinator Pelayanan Publik dan
Tatalaksana

Tandatangan



2. Nama : Desy Irawati, S.Sos., M.Si.
Nip : 19851202 200604 2 006
Jabatan : Analis Tata Laksana

Tandatangan



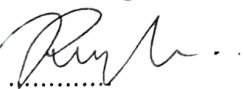
3. Nama : Jelita Asti Rahayu, S.IP., M.A
Nip : 19920714 201406 2 002
Jabatan : Analis Pelayanan Publik

Tandatangan



4. Nama : Rendi Kurniawan, S.STP.
Nip : 19960914 201808 1 002
Jabatan : Penyusun Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria

Tandatangan



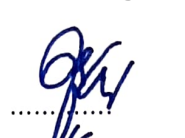
1. Nama : Dra. Elida Susanti, M.Si
Nip : 19661208 199303 2 006
Jabatan : Perencana Ahli Muda

Tandatangan



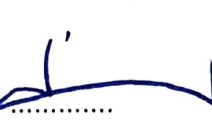
2. Nama : Asti Riswiwayanti, S.H., M.Si.
Nip : 19740511 199903 2 006
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman
Modal

Tandatangan



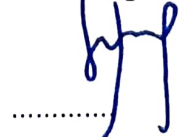
3. Nama : Andy Afriandy Raumanen, S.IP.
Nip : 19760405 200212 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal

Tandatangan



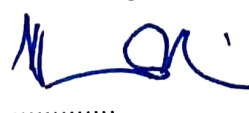
4. Nama : Tati Hartati, S.STP., M.M.
Nip : 19830619 200312 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Data,
Pengembangan Teknologi
Informasi Dan Pengaduan

Tandatangan



5. Nama : Mursidi, S.AP., M.Si.
Nip : 19830917 200604 1 008
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan
Perizinan Pembangunan

Tandatangan



6. Nama : Dedi Mohamad Irpan, S.Sos., M.M.
Nip : 19720605 199803 1 011
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan
Perizinan Jasa Usaha

Tandatangan



Bekasi, 2022
Mengetahui,

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



KEPALA BAGIAN ORGANISASI,

WIDY TIAWARMAN, S.STP., M.Si.

Pembina / IVa
Nip. 19811022 200012 1 003

LINTONG DIANTO PUTRA A.P., SH., M.Si.

Pembina Utama Muda / IVc
Nip. 19740829 199601 1 001